

LAPORAN KINERJA

**KANTOR PELAYANAN PAJAK
MADYA SURABAYA
TAHUN 2024**



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH JAWA TIMUR I
KPP MADYA SURABAYA**

**SURABAYA
2025**

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja (LAKIN) Kantor Pelayanan Pajak Madya Surabaya Tahun 2024 dibuat sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban atas kinerja yang telah dilaksanakan pada tahun 2024. Keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaan program yang telah direncanakan selama tahun 2024 akan menjadi acuan kinerja pada tahun-tahun berikutnya.

LAKIN ini disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Nota Dinas Biro Perencanaan dan Keuangan nomor ND-1263/SJ.1/2024 tentang Penyusunan LAKIN Kementerian Keuangan Tahun 2024.

Demikian LAKIN ini dibuat untuk memberikan gambaran yang transparan dan jelas atas kinerja KPP Madya Surabaya, sekaligus sebagai pertanggungjawaban kinerja instansi berbasis Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja (ABK) dalam pencapaian visi dan misi Direktorat Jenderal Pajak pada tahun 2024.

Surabaya, 31 Januari 2025
Kepala Kantor



Ditandatangani secara elektronik
Teguh Iman Wirotomo

IKHTISAR EKSEKUTIF

Target penerimaan pajak yang diemban oleh DJP dari tahun ke tahun terus meningkat seiring dengan semakin tingginya biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah dalam membiayai pembangunan ini, namun disisi lain perbaikan citra DJP merupakan hal yang harus segera diwujudkan guna membangun kepercayaan masyarakat.

Kedua hal ini merupakan hal yang harus dipenuhi dan tidak bisa dipisahkan satu sama lainnya, untuk itu KPP Madya Surabaya sebagai salah satu ujung tombak dalam pelaksanaannya telah menetapkan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai pada tahun 2024.

Sesuai dengan *blue print* (cetak biru) kebijakan DJP maka tujuan KPP Madya Surabaya adalah mewujudkan citra dan target pajak menjadi nyata. Target penerimaan pajak KPP Madya Surabaya pada tahun 2024 adalah Rp21.117.723.197.000,00. Target ini menjadi sasaran yang hendak diwujudkan dalam tahun 2024.

Berdasarkan hasil analisis akuntabilitas kinerja diketahui bahwa target penerimaan pajak tercapai sebesar 100,03% dari rencana. KPP Madya Surabaya berhasil mencapai target penerimaan empat tahun berturut-turut atau *quattrick*. Akan tetapi, terdapat hal yang harus menjadi perhatian sebagai bahan evaluasi tahun-tahun berikutnya. Hal tersebut adalah realisasi penerimaan pajak dari kegiatan pengujian kepatuhan material yang efektif. Di sisi lain KPP Surabaya dapat mencapai prestasi kinerja yang membangggakan yaitu dalam mewujudkan kepatuhan tahun berjalan yang tinggi, edukasi dan pelayanan yang efektif, pengawasan pembayaran masa yang efektif, pengawasan kepatuhan material yang efektif, SDM yang kompeten, organisasi yang berkinerja tinggi, dan pengelolaan keuangan yang optimal. Pada 2024 ini, KPP Madya Surabaya mencapai realisasi Nilai Kinerja Organisasi sebesar 108,54.

Meskipun kinerja tahun 2024 belum semuanya menunjukkan hasil yang memuaskan, namun kondisi tersebut tidak akan menyurutkan langkah segenap jajaran pegawai KPP Madya Surabaya untuk terus bahu-membahu mengatasi kendala atau yang ada guna mewujudkan kinerja yang jauh lebih baik untuk masa yang akan datang.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	1
KATA PENGANTAR	2
IKHTISAR EKSEKUTIF	3
DAFTAR ISI.....	4
BAB I.....	6
A. Latar Belakang	6
B. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi	6
C. Mandat yang Diberikan.....	8
D. Peran Strategis Instansi	8
E. Kekuatan Berbagai Sumber Daya yang Ada	8
1. Sumber Daya Manusia.....	8
2. Sarana/ prasarana	9
3. Wilayah Kerja.....	9
4. Aspek-aspek Eksternal	9
F. Sistematika Pelaporan.....	9
BAB II.....	11
A. Rencana Strategis.....	11
1. Visi.....	11
2. Misi	11
3. Tujuan dan Sasaran	11
4. Kebijakan	12
5. Program.....	12
B. Perjanjian Kinerja.....	12
1. Perjanjian Kinerja	12
2. Refinement Kontrak Kinerja.....	14
BAB III	15
A. Capaian Kinerja Organisasi	15
1. Persentase Realisasi Penerimaan Pajak	16
2. Indeks Realisasi Pertumbuhan Penerimaan Pajak Bruto dan Deviasi Proyeksi Perencanaan Kas	19
3. Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	21
4. Persentase Capaian Tingkat Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	24

5.	Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM).....	27
6.	Persentase Perubahan Perilaku Laport dan Bayar atas Kegiatan Edukasi dan Penyuluhan.....	29
7.	Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan	31
8.	Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Strategis	34
9.	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Strategis.....	35
10.	Persentase Pemanfaatan data selain tahun berjalan	38
11.	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	40
12.	Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian	42
13.	Tingkat Efektivitas Penagihan.....	44
14.	Persentase Penyampaian Usul Pemeriksaan Bukti Permulaan.....	46
15.	Persentase Penyelesaian Laporan Pengamatan dan Produksi Alat Keterangan	48
16.	Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan kegiatan Kebintalan SDM.....	50
17.	Indeks Penilaian Integritas Unit	52
18.	Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko	54
19.	Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran.....	57
B.	Realisasi Anggaran.....	60
1.	Bagian Anggaran 15	60
2.	Bagian Anggaran 999	62
C.	Kinerja Lain-Lain.....	62
BAB IV		64
LAMPIRAN-LAMPIRAN		65

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

LAKIN disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Nota Dinas Biro Perencanaan dan Keuangan nomor ND-1263/SJ.1/2024 tentang Penyusunan LAKIN Kementerian Keuangan Tahun 2024. Laporan kinerja dapat memberikan gambaran mengenai sejauh mana tujuan atau target yang telah ditetapkan dalam periode tertentu tercapai. Penyusunan laporan kinerja juga penting untuk dilakukan dalam menciptakan akuntabilitas dalam organisasi. Stakeholder baik internal maupun eksternal dapat melihat sejauh mana kegiatan yang dilakukan sesuai dengan tujuan yang sudah ditetapkan. Selain itu, laporan kinerja dapat menjadi alat untuk mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki. Dengan demikian, organisasi dapat terus meningkatkan kinerjanya untuk mencapai hasil yang lebih optimal.

Pada tahun 2024, KPP Madya Surabaya mendapatkan target penerimaan lebih tinggi dibanding tahun 2023. KPP Madya Surabaya memiliki target penerimaan sebesar Rp21.117.723.197.000,00. Dengan adanya kenaikan ini, seluruh elemen KPP Madya Surabaya saling bersinergi untuk dapat mewujudkan target tersebut. Selain itu, KPP Madya Surabaya juga berusaha untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dengan melakukan penyuluhan pajak kepada Wajib Pajak KPP Madya Surabaya dan meningkatkan pengawasan terhadap kewajiban pajak yang belum dilaksanakan secara tepat waktu. Peningkatan kualitas SDM tak luput dari perhatian. KPP Madya Surabaya berusaha untuk meningkatkan kompetensi dan kapasitas pegawai dengan program-program pelatihan yang dilaksanakan.

B. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 184/PMK.01/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.01/2017 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak Pasal 57A, Kantor Pelayanan Pajak Madya Surabaya dibentuk sebagai tempat pelaporan dan diselenggarakannya administrasi bagi Wajib Pajak - Wajib Pajak tertentu di wilayah Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur I. KPP Madya Surabaya mengemban tugas melaksanakan pelayanan, edukasi, pengawasan, dan penegakan hukum

Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan Pajak Tidak Langsung Lainnya dalam wilayah Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur I berdasarkan peraturan perundang-undangan.

KPP Madya Surabaya menyelenggarakan fungsi :

- a. Analisis, penjabaran, dan pencapaian target penerimaan pajak;
- b. Edukasi, pelayanan, dan pengelolaan pelaporan Wajib Pajak;
- c. Pendaftaran Wajib Pajak dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak;
- d. Pengukuhan dan pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;
- e. Penyelesaian tindak lanjut pengajuan/pencabutan permohonan Wajib Pajak maupun masyarakat;
- f. Pengawasan, pemeriksaan, penilaian, dan penagihan pajak;
- g. Penetapan, penerbitan, dan/atau pembetulan produk hukum dan produk layanan perpajakan;
- h. Pengawasan dan pemantauan tindak lanjut pengampunan pajak;
- i. Penjaminan kualitas data hasil perekaman dan hasil identifikasi data internal dan eksternal;
- j. Pemutakhiran basis data perpajakan;
- k. Pengelolaan kinerja dan pengelolaan risiko;
- l. Pelaksanaan dan pemantauan kepatuhan internal;
- m. Penatausahaan dan pengelolaan piutang pajak;
- n. Pelaksanaan tindak lanjut kerjasama perpajakan;
- o. Pengelolaan dokumen perpajakan dan nonperpajakan; dan
- p. Pelaksanaan administrator kantor.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 184/PMK.01/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.01/2017 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak Pasal 57C, dilihat dari Struktur Organisasinya maka KPP Madya Surabaya terdiri dari:

1. Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal;
2. Seksi Penjaminan Kualitas Data;
3. Seksi Pelayanan;
4. Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan;
5. Seksi Pengawasan dan Konsultasi I;
6. Seksi Pengawasan dan Konsultasi II;
7. Seksi Pengawasan dan Konsultasi III;
8. Seksi Pengawasan dan Konsultasi IV;
9. Seksi Pengawasan dan Konsultasi V;
10. Seksi Pengawasan dan Konsultasi VI; dan
11. Kelompok Jabatan Fungsional.

C. Mandat yang Diberikan

Berkaitan dengan pencapaian tujuan dan sasaran utama, mandat yang diberikan kepada Kantor Pelayanan Pajak Madya Surabaya adalah Target Penerimaan Pajak Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp21.117.723.197.000,00 dengan rincian rencana penerimaan Pajak Penghasilan Non Migas sebesar Rp4.948.359.676.000,00, Pajak Pertambahan Nilai & Pajak Penjualan Barang Mewah sebesar Rp16.167.787.841.000,00 dan Pajak lainnya Rp 1.575.680.000,00.

D. Peran Strategis Instansi

Kantor Pelayanan Pajak Madya Surabaya merupakan instansi pemerintah di bawah Direktorat Jenderal Pajak yang bernaung pada Kementerian Keuangan. Dalam hal ini, Kantor Pelayanan Pajak Madya Surabaya berperan sebagai salah satu ujung tombak Direktorat Jenderal Pajak dalam memenuhi target penerimaan pajak secara nasional sesuai dengan amanat pasal 23 UUD 1945.

E. Kekuatan Berbagai Sumber Daya yang Ada

Kekuatan berbagai sumber daya yang ada merupakan faktor yang berperan dalam pencapaian sasaran dan program kerja sehingga merupakan faktor kunci keberhasilan.

Untuk melaksanakan tugas yang diemban, Kantor Pelayanan Pajak Madya Surabaya didukung dengan sarana dan prasarana sebagai peran strategis dalam pelaksanaan tugas dan program kerja yang dicanangkan, diantaranya :

1. Sumber Daya Manusia

Pegawai Kantor Pelayanan Pajak Madya Surabaya berjumlah 122 orang dengan perincian sebagai berikut :

a) Perincian per golongan:

Golongan II	: 24 Orang
Golongan III	: 79 Orang
Golongan IV	: 19 Orang

b) Dilihat dari tingkat pendidikan yang ada, maka Pegawai dengan tingkat / jenis pendidikan:

SMA	: 1 Orang
Diploma I	: 13 Orang
Sarjana Muda/D3	: 17 Orang
Diploma IV/ S1	: 58 Orang
S2	: 33 Orang
S3	: -

c) Dilihat dari tingkat jabatan pegawai, maka dapat dirinci sebagai berikut:

Pejabat Administrator	: 1 Orang
Pejabat Pengawas	: 10 Orang
Fungsional Pemeriksa Pajak	: 30 Orang
Fungsional Penilai Pajak	: 1 Orang
Fungsional Penyuluh Pajak	: 5 Orang
Asisten Penilai Pajak	: 2 Orang

Asisten Penyuluh Pajak	: 1 Orang
Account Representative	: 40 Orang
Bendaharawan	: 1 Orang
Sekretaris	: 2 Orang
Juru Sita	: 3 Orang
Administrator Sistem	: 2 Orang
Pelaksana	: 24 Orang

2. Sarana/ prasarana

- Gedung :
Kantor Pelayanan Pajak Madya Surabaya menempati gedung di Jalan Jagir Wonokromo No. 104 lantai 4-5, Surabaya.
- Inventaris Kendaraan :
 - a) Kendaraan Roda dua : 10 buah
 - b) Kendaraan Roda empat : 7 buah
- Jaringan sistem informasi perpajakan di Kantor Pelayanan Pajak Madya Surabaya dengan menggunakan sistem LAN
- Perangkat Komputer terdiri dari :
 - a) Server : 16 buah
 - b) Modem : 2 buah
 - c) Printer : 87 buah
 - d) Hub : 3 buah
 - e) UPS : 1 buah
 - f) Note Book : 88 buah

3. Wilayah Kerja

Kantor Pelayanan Pajak Madya Surabaya mempunyai wilayah kerja pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur I meliputi seluruh wilayah kota Surabaya.

4. Aspek-aspek Eksternal

- a) Hubungan dengan pihak ketiga / Pemda / Instansi terkait cukup baik;
- b) Potensi di wilayah Kantor Pelayanan Pajak Madya Surabaya cukup baik;
- c) Kondisi lingkungan yang menunjang;
- d) Perubahan atau perkembangan sosial dan ekonomi yang sangat cepat dengan tingkat ketidakpastian yang cukup tinggi.

F. Sistematika Pelaporan

1. Ikhtisar Eksekutif

Berisi laporan yang mencerminkan adanya tujuan dan sasaran yang akan dicapai beserta hasil capaian tersebut, kendala yang dihadapi beserta langkah yang telah diambil untuk menanggulangi masalah yang timbul.

2. Bab I Pendahuluan

Pada bab ini berisi landasan perlunya penyusunan laporan kinerja dan permasalahan utama yang sedang dihadapi organisasi. Selain itu pada bab ini juga membahas hal-hal umum tentang KPP Madya Surabaya serta uraian tugas, fungsi dan struktur organisasi pada unit Kantor Pelayanan Pajak. Diuraikan juga tentang mandat atau tugas yang diberikan oleh instansi vertikalnya yaitu Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur I, dan peran strategis serta kekuatan berbagai sumber daya yang mendukung tercapainya program kerja KPP Madya Surabaya.

3. Bab II Perencanaan Kerja

Berisi tentang gambaran singkat rencana strategis dan penetapan kinerja, sasaran yang ingin diraih pada tahun 2024 serta kaitannya dengan capaian visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan dan program instansi. Selain itu, rencana kinerja kegiatan sesuai dengan program tahun 2024 dengan indikator keberhasilan pencapaiannya.

4. Bab III Akuntabilitas Kinerja

Pada bab ini menyajikan uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja termasuk didalamnya hambatan/ kendala dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil. Selain itu dilaporkan pula akuntabilitas keuangan yang terjadi pada tahun 2024.

5. Bab IV Penutup

Sajian berisi tinjauan umum tentang keberhasilan dan kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan pencapaian kinerja serta strategi pemecahan masalah untuk tahun mendatang.

6. Lampiran

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Rencana Strategis (Renstra) adalah dokumen perencanaan jangka menengah yang berfungsi sebagai panduan dalam pengambilan kebijakan jangka menengah di lingkungan DJP. Renstra DJP disusun untuk jangka menengah (periode lima tahun). Renstra DJP Tahun 2020–2024 yang memuat peran organisasi dalam mendukung pencapaian visi, misi, dan sasaran strategi organisasi untuk tahun 2020–2024.

1. Visi

Visi Direktorat Jenderal Pajak adalah suatu gambaran menantang tentang keadaan masa depan Direktorat Jenderal Pajak yang sungguh-sungguh diinginkan untuk ditransformasikan menjadi realitas melalui komitmen dan tindakan oleh segenap jajaran Direktorat Jenderal Pajak. Visi Direktorat Jenderal Pajak yang ingin diwujudkan oleh KPP Madya Surabaya adalah ***Menjadi Mitra Terpercaya Pembangunan Bangsa untuk Menghimpun Penerimaan Negara melalui Penyelenggaraan Administrasi Perpajakan yang Efisien, Efektif, Berintegritas, dan Berkeadilan dalam rangka mendukung Visi Kementerian Keuangan: "Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk Mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif dan Berkeadilan"***.

2. Misi

Misi Direktorat Jenderal Pajak adalah suatu pernyataan yang menggambarkan tujuan keberadaan (eksistensi), tugas, fungsi, peranan dan tanggung jawab Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang dan peraturan serta kebijakan pemerintah dengan dijiwai oleh prinsip-prinsip dan nilai-nilai strategis organisasi di dalam berbagai bidang lingkungan Direktorat Jenderal Pajak beraktivitas dan berinteraksi. Misi Direktorat Jenderal Pajak yang ingin diwujudkan oleh KPP Madya Surabaya yaitu ***"Merumuskan regulasi perpajakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia, meningkatkan kepatuhan pajak melalui pelayanan berkualitas dan terstandardisasi, edukasi dan pengawasan yang efektif, serta penegakan hukum yang adil dan mengembangkan proses bisnis inti berbasis digital didukung budaya organisasi yang adaptif dan kolaboratif serta aparatur pajak yang berintegritas, profesional, dan bermotivasi"***.

3. Tujuan dan Sasaran

Tujuan Kantor Pelayanan Pajak Madya Surabaya selaras dengan tujuan Direktorat Jenderal Pajak yaitu mewujudkan pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan, penerimaan negara yang optimal, serta birokrasi dan layanan publik yang *agile*, efektif, dan efisien. Sasaran strategis Direktorat Jenderal Pajak yang ingin dicapai oleh Kantor Pelayanan Pajak Madya Surabaya adalah kebijakan fiskal yang ekspansif dan konsolidatif, penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal, organisasi dan SDM yang optimal, sistem informasi yang andal dan terintegrasi dan pengendalian dan pengawasan internal yang bernilai tambah. Dalam usaha mencapai tujuan, Kantor Pelayanan Pajak Madya Surabaya berusaha untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat Wajib Pajak,

meningkatkan penerimaan pajak, sehingga *tax ratio* atau perbandingan antara realisasi penerimaan pajak dengan Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) semakin baik. *Tax Ratio* juga dapat mengindikasikan keberhasilan Kantor Pelayanan Pajak Madya Surabaya dalam proses pemungutan pajak. Pada akhirnya sasaran yang ingin dicapai oleh KPP Madya Surabaya adalah tercapainya target penerimaan pajak tahun 2024 sebesar Rp21.117.723.197.000,00.

4. Kebijakan

Kebijakan ini pada dasarnya merupakan ketentuan yang telah ditetapkan dan menjadi pedoman, petunjuk pelaksanaan program / kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan serta visi dan misi. Kebijakan yang telah ditetapkan untuk tahun anggaran 2024, sebagai berikut ;

- a. Perpajakan untuk mendukung pemulihan dan transformasi ekonomi
Dilaksanakan dengan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dan penguatan sektor strategis dalam rangka transformasi ekonomi.
- b. Optimalisasi dan reformasi perpajakan
Dilaksanakan dengan mengoptimalkan penerimaan melalui perluasan basis pajak, memperkuat pengawasan dan penegakan hukum yang berkeadilan, meneruskan reformasi perpajakan yang meliputi bidang pelayanan organisasi, SDM, IT dan basis data, proses bisnis, serta peraturan pajak.

5. Program

Program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan guna mencapai sasaran. Selanjutnya program yang dilakukan KPP Madya Surabaya dalam tahun anggaran 2024 adalah sebagai berikut :

1. Penerimaan Negara dari Sektor Pajak yang Optimal;
2. Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi;
3. Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi;
4. Edukasi dan pelayanan yang efektif;
5. Persentase pengawasan pembayaran masa;
6. Pengujian kepatuhan material yang efektif;
7. Penegakan hukum yang efektif;
8. Data dan informasi yang berkualitas;
9. Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif;
10. Pengelolaan keuangan yang akuntabel.

B. Perjanjian Kinerja

1. Perjanjian Kinerja

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Penyusunan IKU/IKI di seluruh unit DJP disusun oleh Sekretariat Direktorat Jenderal selaku KKO-One dengan melibatkan Direktorat terkait pengampu IKU/IKI. Dalam pembuatan Peta Strategi, Sasaran Strategis

(SS), dan IKU/IKI KPDJP mempertimbangkan Renstra, Renja, RPJMN, arahan Menteri, dan juga masukan dari Unit Vertikal. Keterlibatan Unit yang dimaksud dalam penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 diantaranya mengirimkan Nota Dinas Usul IKU/IKI Baru, Hapus, maupun Perbaikan. Penetapan kinerja dibuat sebagai bentuk komitmen pencapaian kinerja, sesuai dengan program dan kebijakan yang telah ditetapkan dalam penetapan kinerja 2024. Dengan cara memanfaatkan sumber daya yang ada meliputi SDM, sarana dan prasarana serta dana untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Dalam penetapan kinerja ini telah ditetapkan pula sasaran strategis yang ingin dicapai, indikator kinerja, serta target indikator kinerja .

Sasaran Strategis didefinisikan sebagai pernyataan tentang yang ingin dicapai (bersifat *output/outcome*), atau apa yang ingin dilakukan (bersifat proses), atau yang seharusnya dimiliki (bersifat input).

Indikator kinerja adalah alat ukur bagi pencapaian sasaran strategis yang memenuhi kriteria SMART-C : *Spesific* (spesifik), *Measureable* (terukur), *Achievable* (dapat dicapai), *Relevant* (sesuai visi dan misi serta tujuan strategis organisasi), *Time-bounded* (memiliki batas waktu pencapaian) dan *Continuously improved* (sesuai perkembangan strategi organisasi).

Untuk mengetahui pencapaian sasaran, telah ditetapkan indikator kinerja sebagai indikator keberhasilan. Dimana nilai keberhasilan ditentukan oleh realisasi dibandingkan dengan target. Sesuai penetapan kinerja yang telah disusun maka sasaran strategis yang ingin dicapai, indikator kinerja, serta target dapat dirinci sebagai berikut:

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja Utama		Target
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal	<u>01a-CP</u>	Persentase realisasi penerimaan pajak	100%
		<u>01b-CP</u>	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi	<u>02a-CP</u>	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100%
		<u>02b-CP</u>	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100%
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi	<u>03a-CP</u>	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100%
4	Edukasi dan pelayanan yang efektif	<u>04a-CP</u>	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74%
		<u>04b-N</u>	Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan	100%
5	Pengawasan pembayaran masa yang efektif	<u>05a-CP</u>	Persentase pengawasan pembayaran masa WP Strategis	90%

6	Pengujian kepatuhan material yang efektif	<u>06a-CP</u>	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Strategis	100%
		<u>06b-N</u>	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100%
		<u>06c-N</u>	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100%
7	Penegakan hukum yang efektif	<u>07a-CP</u>	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100%
		<u>07b-CP</u>	Tingkat efektivitas penagihan	75%
		<u>07c-N</u>	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100%
8	Data dan informasi yang berkualitas	<u>08a-CP</u>	Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Produksi Alat Keterangan	100%
9	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif	<u>09a-N</u>	Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	100
		<u>09b-N</u>	Indeks Penilaian Integritas Unit	85
		<u>09c-N</u>	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90
10	Pengelolaan keuangan yang akuntabel	<u>10a-CP</u>	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100

2. Refinement Kontrak Kinerja

Sebagai bentuk upaya dalam mencapai sasaran strategis yang lebih ideal, terdapat beberapa perbaikan dan penyempurnaan IKU/IKI tahun 2025. DJP selalu melakukan perbaikan dan penyempurnaan pada beberapa IKU. Penyempurnaan (refinement) IKU dilakukan agar pengukuran kinerja yang tergambar melalui IKU semakin baik dari tahun-tahun sebelumnya. Perbaikan dan penyempurnaan dilakukan melalui perubahan ruang lingkup/reformulasi IKU, definisi IKU, target IKU serta penetapan IKU baru dan penghapusan IKU. Pada tahun 2024, Kantor Pelayanan Pajak Madya Surabaya telah mengirimkan Nota Dinas secara berjenjang kepada Kanwil DJP Jawa Timur I melalui Nota Dinas Kepala Kantor Pelayanan Pajak Madya Surabaya nomor ND-1546/KPP.1111/2024 tanggal 30 Agustus 2024 hal Penyampaian Permintaan Masukan Refinement Peta Strategis, Sasaran Strategis, dan Indikator Kinerja Utama/Indikator Kinerja Individu (IKU/IKI) Unit Vertikal Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2025 yang selanjutnya akan disampaikan berjenjang oleh Kanwil DJP Jawa Timur I selaku AKO-Two kepada Sekretariat Direktorat Jenderal selaku KKO-One.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Tingkat kinerja masing-masing program KPP Madya Surabaya selama tahun 2024 dapat digambarkan dalam tabel sebagaimana berikut:

**NILAI KINERJA ORGANISASI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP JAWA TIMUR I
KPP KPP MADYA SURABAYA
PERIODE PELAPORAN SAMPAI DENGAN TRIWULAN IV
TAHUN 2024**

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Polarisasi	V/C	Bobot IKU	Bobot Tertimbang	Indeks Capaian
Stakeholder Perspective							30,00%	97,72
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal							97,72
1a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak	100,00%	100,03%	Max	E/L	26,00%	57,78%	100,03
1b-CP	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100,00	94,56	Max	P/L	19,00%	42,22%	94,56
Customer Perspective							20,00%	104,30
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi							108,46
2a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100,00%	100,03%	Max	E/L	26,00%	57,78%	100,03
2b-CP	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100,00%	120,01%	Max	P/L	19,00%	42,22%	120,00
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi							100,14
3a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100,00%	100,14%	Max	E/M	21,00%	100,00%	100,14
Internal Process Perspective							25,00%	117,24
4	Edukasi dan pelayanan yang efektif							113,26
4a-CP	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74,00%	88,80%	Max	E/M	21,00%	50,00%	120,00
4b-N	Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan	100,00%	106,51%	Max	E/M	21,00%	50,00%	106,51
5	Persentase pengawasan pembayaran masa							120,00
5a-CP	Persentase pengawasan pembayaran masa WP Strategis	90,00%	118,34%	Max	P/M	14,00%	100,00%	120,00
6	Pengujian kepatuhan material yang efektif							112,95
6a-CP	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Strategis	100,00%	120,00%	Max	P/M	14,00%	33,33%	120,00
6b-N	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100,00%	119,70%	Max	P/M	14,00%	33,33%	119,70
6c-N	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100,00%	99,17%	Max	P/M	14,00%	33,33%	99,17
7	Penegakan hukum yang efektif							120,00
7a-CP	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100,00%	120,00%	Max	P/M	14,00%	26,92%	120,00
7b-CP	Tingkat efektivitas penagihan	75,00%	112,42%	Max	P/L	19,00%	36,54%	120,00
7c-N	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100,00%	200,00%	Max	P/L	19,00%	36,54%	120,00
8	Data dan informasi yang berkualitas							120,00
8a-CP	Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Produksi Alat Keterangan	100,00%	120,00%	Max	P/M	14,00%	100,00%	120,00
Learning & Growth Perspective							25,00%	116,21
9	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif							112,42
9a-N	Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM	100,00	117,14	Max	P/M	14,00%	33,33%	117,14
9b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit	85,00	94,11	Max	P/M	14,00%	33,33%	110,71
9c-N	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90,00	98,50	Max	P/M	14,00%	33,33%	109,44
10	Pengelolaan keuangan yang akuntabel							120,00
10a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100,00	120,00	Max	P/M	14,00%	100,00%	120,00
Nilai Kinerja Organisasi								108,54

Dicetak melalui Dashboard Kinerja Organisasi dengan tabel yang dibentuk tanggal 14 Januari 2025 pukul 15:09:01 WIB

Seluruh kegiatan dari program di atas terdapat banyak keberhasilan, ada beberapa kegiatan yang cukup menentukan dan secara signifikan menyebabkan KPP Madya Surabaya dapat mencapai sasaran. Namun masih ada 2 Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan kode 1b-CP dan 6c-N perlu mendapatkan evaluasi agar tahun-tahun berikutnya dapat mencapai target yang telah ditetapkan. Berikut evaluasi atas kegiatan-kegiatan tersebut:

1. Persentase Realisasi Penerimaan Pajak

a. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	20.00%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
Realisasi	23.24%	47.27%	47.27%	68.22%	68.22%	100.03%	100.03%
Capaian	116.20%	94.54%	94.54%	90.96%	90.96%	100.03%	100.03%

Sumber: Dashboard Kinerja di Mandor data tanggal 14 Januari 2025

- Deskripsi Sasaran Strategis

Optimalisasi penerimaan pajak sesuai target APBN atau APBN-P melalui penyempurnaan regulasi; pelayanan, edukasi, kehumasan, dan Pengawasan Pembayaran Masa; Pengawasan Kepatuhan Material dan penegakan hukum; serta efisiensi proses bisnis di bidang perpajakan

- Definisi IKU

Realisasi penerimaan pajak adalah jumlah realisasi penerimaan pajak bruto dikurangi pembayaran Surat Perintah Membayar Kelebihan Pembayaran Pajak (SPMKP), Surat Perintah Membayar Imbalan Bunga (SPMIB), dan Surat Perintah Membayar Pengembalian Pendapatan (SPMPP).

Realisasi penerimaan pajak bruto adalah jumlah realisasi penerimaan pajak melalui Modul Penerimaan Negara (MPN) baik dalam Rupiah maupun mata uang asing, penerimaan pajak yang dibukukan secara manual, ditambah Pemindahbukuan (Pbk) Terima, dikurangi Pbk Kirim.

Target penerimaan pajak Direktorat Jenderal Pajak (DJP) merupakan target penerimaan pajak yang tercantum dalam UU APBN/APBN-P, peraturan perundang-undangan lainnya tentang APBN, atau besaran lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Target penerimaan pajak Kanwil merupakan target penerimaan pajak DJP yang didistribusikan ke masing-masing Kanwil DJP, yang ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Pajak yang mengatur tentang Distribusi Rencana Penerimaan Per Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak. Target penerimaan pajak KPP merupakan target penerimaan pajak Kanwil DJP yang didistribusikan ke masing-masing KPP yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala Kanwil DJP yang mengatur tentang Distribusi Rencana Penerimaan Per KPP.

Catatan: Penerimaan WP dari awal tahun s.d. pindah diadministrasikan di KPP lama, sedangkan penerimaan WP dari SK pindah s.d. akhir tahun diadministrasikan di KPP baru

- Formula IKU

Formula:	
Realisasi penerimaan pajak	x 100%
Target penerimaan pajak	

- **Penjelasan IKU**

URAIAN.	TARGET 2024	2024	2023	Growth 2023	Growth 2024	capaian 2023	capaian 2024
A. Pajak Penghasilan	4.948.359.676.000	5.172.931.474.778	5.167.084.882.051	22,58%	0,11%	102,26%	104,54%
B. PPN dan PPnBM	16.167.787.841.000	15.950.076.388.189	15.088.965.844.779	14,78%	5,71%	101,37%	98,65%
C. PBB dan BPHTB	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
D. Pajak Lainnya	1.575.680.000	1.676.862.241	480.486.322	-87,12%	248,99%	102,88%	106,42%

Sumber: Aplikasi Appportal tanggal 24 Januari 2025

Pencapaian realisasi maupun pertumbuhan penerimaan KPP Madya Surabaya tahun 2024 sudah cukup optimal. Triwulan IV tahun 2024 KPP Madya Surabaya mampu mengamankan IKU Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dengan pencapaian sebesar 100,03 dari target. Penerimaan KPP Madya Surabaya naik dari tahun sebelumnya dalam berbagai komponen meliputi Pajak Penghasilan, PPN dan PPnBM serta Pajak lainnya.

- b. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja empat tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase Realisasi Penerimaan Pajak	84,14%	103,70%	108,80%	101,59%	100,03%

Sumber: Laporan Nilai Kinerja Organisasi Tahun 2020 - 2024

Secara pencapaian, Persentase realisasi penerimaan pajak naik jika dibandingkan dengan tahun 2020 dan turun dibandingkan 3 tahun sebelumnya dimana pada tahun 2021, 2022 dan 2023 realisasnya berturut-turut adalah 103,70, 108,73% dan 101,59%. Akan tetapi jika dibandingkan tahun 2022 dan 2023, target rupiah yang diamanahkan kepada KPP Madya Surabaya pada tahun 2024 ini jauh lebih tinggi. Pada tahun 2022 dan 2023 target penerimaan pajak berturut-turut adalah Rp15.929.254.551.000 dan Rp19.938.506.577.000,00 sedangkan tahun 2024 target penerimaan pajak sebesar Rp21.117.723.197.000,00. Capaian penerimaan pajak pada tahun 2024 didorong oleh membaiknya perekonomian nasional, peningkatan harga komoditas, dan implementasi UU HPP berupa pelaksanaan PPS, penyesuaian tarif PPN, penerapan pajak kripto, pajak fintech-P2P lending, dan PPN PMSE.

- c. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Persentase Realisasi Penerimaan Pajak	100%	100%	100%	100,03%

Sumber: Dashboard Kinerja Organisasi di Mandor data tanggal 14 Januari 2025 dan Buku Renstra DJP 2020 - 2024

Tercapainya target IKU Persentase realisasi penerimaan pajak menggambarkan pemulihan aktivitas ekonomi yang semakin menguat. Beberapa hal yang juga melatarbelakangi membaiknya kinerja penerimaan sampai dengan akhir Desember 2024 diantaranya:

- Mayoritas sektor-sektor usaha tumbuh positif;
- Reformasi fiskal sebagai implementasi UU HPP berupa pelaksanaan PPS, penyesuaian tarif PPN, serta PPN PMSE;
- Pertumbuhan yang positing secara kumulatif pada kinerja PPM dan PKM.

d. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Persentase Realisasi Penerimaan Pajak	100%	100%	100,03%

Sumber: Dashboard Kinerja Organisasi di Mandor data tanggal 14 Januari 2025

Penerimaan pajak sampai dengan Triwulan IV Tahun 2024 mampu melampaui target yang telah ditetapkan, hal ini diiringi dengan kinerja jenis pajak utama yang mengalami pertumbuhan positif. Membaiknya kinerja PPN Dalam Negeri merupakan salah satu dampak dari kasus Covid-19 di Indonesia yang semakin terkendali, meningkatnya konsumsi masyarakat, dan pemulihan kegiatan ekonomi.

Implementasi UU HPP berupa penyesuaian tarif PPN yang semula tarifnya 10% menjadi 11% ikut mendorong kinerja PPN Dalam Negeri. Sementara itu, membaiknya kinerja PPh Non Migas secara umum dipengaruhi oleh peningkatan aktivitas ekonomi, kenaikan harga komoditas, dan bauran kebijakan.

e. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

Berbagai upaya telah dilakukan oleh KPP Madya Surabaya untuk menunjang capaian kinerja realisasi penerimaan pajak. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja antara lain:

- Melakukan pengawasan atas data pembayaran masa Wajib Pajak;
- Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap capaian penerimaan;
- Penelitian dan tindak lanjut hasil data matching;
- Melakukan bedah Wajib Pajak untuk saling bertukar informasi dan pengetahuan terkait penggalan potensi.

f. Rencana aksi tahun selanjutnya

- Melanjutkan strategi PPM dan PKM salah satunya dengan melakukan bedah Wajib Pajak;
- Pemanfaatan data internal dan eksternal serta aplikasi yang disediakan oleh DJP maupun tools lainnya;
- Memahami dan memaksimalkan aplikasi baru coretax untuk penggalan potensi Wajib Pajak.

2. Indeks Realisasi Pertumbuhan Penerimaan Pajak Bruto dan Deviasi Proyeksi Perencanaan Kas

a. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	100	100	100	100	100	100	100
Realisasi	86	94	94	94.64	94.64	94.56	94.56
Capaian	86.10%	94.30%	94.30%	94.64%	94.64%	94.56%	94.56%

Sumber: Dashboard Kinerja Organisasi di Mandor data tanggal 14 Januari 2025

- Deskripsi Sasaran Strategis

Optimalisasi penerimaan pajak sesuai target APBN atau APBN-P melalui penyempurnaan regulasi; pelayanan, edukasi, kehumasan, dan Pengawasan Pembayaran Masa; Pengawasan Kepatuhan Material dan penegakan hukum; serta efisiensi proses bisnis di bidang perpajakan.

- Definisi IKU

Indeks pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas terdiri dari 2 komponen, yaitu:

- Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto

Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto diukur melalui dua komponen, yaitu: (1) pertumbuhan nasional dengan bobot komponen sebesar 60 persen; serta (2) pertumbuhan unit dengan bobot komponen sebesar 40%. Realisasi capaian masing-masing komponen yang dapat diperhitungkan adalah maksimal 120%. Komponen pertumbuhan nasional adalah hasil perbandingan antara satu ditambah pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun berjalan dengan satu ditambah pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto nasional tahun berjalan dikalikan 100 persen. Komponen pertumbuhan unit kerja adalah hasil penjumlahan antara satu ditambah pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun berjalan dikalikan 100 persen.

Pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun berjalan (t) adalah realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun berjalan (t) dibagi dengan realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun lalu (t-1) dikalikan 100 persen. Pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto nasional tahun berjalan (t) adalah realisasi penerimaan pajak bruto nasional tahun berjalan (t) dibagi dengan realisasi penerimaan pajak bruto nasional tahun lalu (t-1) dikalikan 100 persen. Realisasi penerimaan pajak bruto adalah jumlah realisasi penerimaan pajak melalui Modul Penerimaan Negara (MPN) baik dalam Rupiah maupun mata uang asing, penerimaan pajak yang dibukukan secara manual, ditambah Pemindahbukuan (Pbk) Terima, dikurangi Pbk Kirim. diadministrasikan di KPP baru.

- Persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas.

Deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas adalah selisih antara proyeksi dengan realisasi dari penerimaan. Penerimaan meliputi penerimaan perpajakan termasuk penerimaan PPH migas, dan bea/cukai, penerimaan PNBP, Hibah dan penerimaan pembiayaan. Dalam satu bulan Komite ALM

dapat melakukan rapat paling kurang 1 (satu) kali. Berdasarkan keputusan rapat Komite ALM yang dituangkan dalam pokok-pokok keputusan rapat Komite ALM yang disusun oleh Sekretariat ALM, tim teknis ALM menyusun proyeksi penerimaan dan pengeluaran. Proyeksi penerimaan dan pengeluaran ini yang menjadi dasar perhitungan IKU.

- Formula IKU
(Komponen pertumbuhan nasional × 60%) + (Komponen pertumbuhan unit kerja × 40%)
- Penjelasan IKU

Pertumbuhan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas memiliki realisasi sebesar 94,56 dari target sebesar 100 dan berada di jalur kuning. Realisasi pertumbuhan pajak bruto sendiri memiliki realisasi sebesar 99,11% dari target 100% dan realisasi proyeksi perencanaan kas memiliki realisasi sebesar 90% dari target sebesar 100%. Realisasi proyeksi perencanaan kas tidak mencapai target karena terdapat proyeksi perencanaan kas yang besar deviasinya sehingga realisasi proyeksi perencanaan kas menjadi kecil. Hal ini diluar prediksi terutama untuk prognosa di bulan februari, maret, juli dan oktober.

- b. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja empat tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	80%	108,24%	64,10%	116,00%	94,56%

Sumber: Laporan Nilai Kinerja Organisasi Tahun 2020 - 2024

Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas pada tahun 2024 lebih rendah dari realisasi pada tahun 2021 dan 2023, namun lebih tinggi dari tahun 2022. Namun perlu diketahui bahwa komponen deviasi proyeksi perencanaan kas baru muncul pada tahun 2023. Jadi pada tahun 2022 dan 2021 komponen IKU ini hanya pertumbuhan penerimaan pajak bruto. Realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan data deviasi proyeksi perencanaan kas ini diperoleh dari Aplikasi Mandor

- c. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi	-	-	100%	94,56%

proyeksi perencanaan kas				
-----------------------------	--	--	--	--

Sumber: Dashboard Kinerja Organisasi di Mandor data tanggal 14 Januari 2025 dan Buku Renstra DJP 2020 – 2024

- d. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100%	100%	94,56%

Sumber: Dashboard Kinerja Organisasi di Mandor data tanggal 14 Januari 2025

Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas sampai dengan akhir Desember 2024 belum memenuhi target yang telah ditetapkan, hal ini disebabkan karena terdapat proyeksi perencanaan kas yang diluar prediksi terutama untuk prognosa di bulan februari, maret, juli dan oktober sehingga deviasinya menjadi besar.

- e. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

Berbagai upaya telah di dilakukan oleh KPP Madya Surabaya untuk menunjang capaian kinerja realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja antara lain:

- Melakukan startegi PPM dan PKM kepada Wajib Pajak;
- melakukan pengawasan atas data pembayaran masa WP;
- melakukan pengecekan kembali angka SPMKP terkait IKU penerimaan untuk memastikan angka realisasi;
- Melakukan koordinasi dengan seksi terkait untuk menghasilkan proyeksi perencanaan kas yang akurat.

- f. Rencana aksi tahun selanjutnya

- Melanjutkan strategi PPM dan PKM salah satunya dengan melakukan bedah WP
- Melanjutkan koordinasi dengan seksi terkait untuk menghasilkan proyeksi perencanaan kas yang lebih akurat.

3. Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)

- a. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	20%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
Realisasi	23.44%	48.80%	48.80%	69.52%	69.52%	100.03%	100.03%
Capaian	117.20%	97.60%	97.60%	92.69%	92.69%	100.03%	100.03%

Sumber: Dashboard Kinerja Organisasi di Mandor data tanggal 14 Januari 2025

- Deskripsi Sasaran Strategis

Peningkatan *voluntary and enforced tax compliance* Wajib Pajak pada tahun berjalan baik secara formal maupun material yang mendukung pencapaian penerimaan pajak yang optimal

- Definisi IKU

Definisi atas penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) beserta masing-masing kegiatannya ditetapkan oleh Kantor Pusat DJP melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak yang mengatur tentang Kebijakan dan Strategi Pengamanan Penerimaan Pajak Nasional.

Target penerimaan pajak dari kegiatan PPM Kanwil adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PPM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP dan telah diassesment oleh direktorat teknis terkait yang ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak tentang Target Angka Mutlak IKU Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) dan Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM). Target penerimaan pajak dari kegiatan PPM KPP adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PPM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP ke Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan dan ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak

- Formula IKU

Formula:	
Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan PPM	x 100%
Target penerimaan pajak dari kegiatan PPM	

- Penjelasan IKU

Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan pengawasan pembayaran masa sebesar Rp19.688.364.232.215 atau 100,03% dari target sebesar Rp19.683.432.390.000 dengan indeks capaian sebesar 100,03 dan berada di jalur hijau. Data realisasi penerimaan pajak dari kegiatan pengawasan pembayaran masa (PPM) pada aplikasi mandor.

b. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja empat tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	-	89,65%	110,67%	102,13%	100,03%

Sumber: Laporan Nilai Kinerja Organisasi Tahun 2020 - 2024

Capaian realisasi IKU penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) pada tahun 2024 lebih rendah dari realisasi pada tahun 2022 dan 2023, namun lebih tinggi dari tahun 2021.

- c. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100%	100%	100%	100,03%

Sumber: Dashboard Kinerja Organisasi di Mandor data tanggal 14 Januari 2025 dan Buku Renstra DJP 2020 - 2024

Tercapainya target IKU Persentase realisasi penerimaan pajak menggambarkan pemulihan aktivitas ekonomi yang semakin menguat. Beberapa hal yang juga melatarbelakangi membaiknya kinerja penerimaan sampai dengan akhir Desember 2024 diantaranya:

- Mayoritas sektor-sektor usaha tumbuh positif;
- Reformasi fiskal sebagai implementasi UU HPP berupa pelaksanaan PPS, penyesuaian tarif PPN, serta PPN PMSE;
- Pertumbuhan yang positing secara kumulatif pada kinerja PPM.

- d. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100%	100%	100,03%

Sumber: Dashboard Kinerja Organisasi di Mandor data tanggal 14 Januari 2025 dan Buku Renstra DJP 2020 – 2024

Penerimaan pajak sampai dengan Triwulan IV Tahun 2024 mampu melampaui target yang telah ditetapkan, hal ini diiringi dengan kinerja jenis pajak utama yang mengalami pertumbuhan positif. Membaiknya kinerja PPN Dalam Negeri merupakan salah satu dampak dari kasus Covid-19 di Indonesia yang semakin terkendali, meningkatnya konsumsi masyarakat, dan pemulihan kegiatan ekonomi.

Implementasi UU HPP berupa penyesuaian tarif PPN yang semula tarifnya 10% menjadi 11% ikut mendorong kinerja PPN Dalam Negeri. Sementara itu, membaiknya kinerja PPh Non Migas secara umum dipengaruhi oleh peningkatan aktivitas ekonomi, kenaikan harga komoditas, dan bauran kebijakan

e. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

Berbagai upaya telah dilakukan oleh KPP Madya Surabaya untuk menunjang capaian kinerja realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM). Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja antara lain:

- Melakukan startegi PPM kepada Wajib Pajak;
- melakukan pengawasan atas data pembayaran masa WP;
- melakukan penelitian data internal dan eksternal;
- melakukan bedah Wajib Pajak untuk saling bertukar informasi dan pengetahuan terkait penggalan potensi.

f. Rencana aksi tahun selanjutnya

- Melanjutkan startegi PPM kepada Wajib Pajak;
- Melanjutkan sharing session atau bedah WP untuk saling bertukar informasi mengenai penggalan potensi
- Memanfaatkan aplikasi coretax di tahun 2025 untuk melakukan penggalan potensi

4. Persentase Capaian Tingkat Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi

a. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	60%	80%	80%	75%	75%	100%	100%
Realisasi	83.59%	114.73%	114.73%	119.33%	119.33%	120.00%	120.00%
Capaian	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%

Sumber: Dashboard Kinerja Organisasi di Mandor data tanggal 14 Januari 2025

- Deskripsi Sasaran Strategis

Peningkatan voluntary and enforced tax compliance Wajib Pajak pada tahun berjalan baik secara formal maupun material yang mendukung pencapaian penerimaan pajak yang optimal

- Definisi IKU

Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh WP Badan dan Orang Pribadi adalah perbandingan antara jumlah SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2023 dari WP Badan dan Orang Pribadi dengan Target WP Badan dan Orang Pribadi yang menyampaikan SPT Tahunan PPh dengan memperhatikan kualitas waktu;

SPT Tahunan PPh adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu tahun pajak atau bagian tahun pajak, yang meliputi:

- SPT 1771 dan SPT 1771\$ yang dilaporkan oleh Badan;
- SPT 1770, 1770S dan 1770SS yang dilaporkan oleh Orang Pribadi;

SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2023 dari WP Badan dan Orang Pribadi Wajib SPT adalah SPT Tahunan Tahun Pajak 2023 yang disampaikan oleh WP Badan dan Orang Pribadi yang diterima selama tahun 2024 termasuk SPT Tahunan PPh selain Tahun Pajak 2023 yang batas akhir penyampaian pada Tahun 2024 (tidak termasuk pembetulan SPT Tahunan PPh).

Terkait ketepatan waktu, pembobotan pelaporan SPT pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- atas SPT Tahunan PPh yang dilaporkan tepat waktu pada tahun 2024 oleh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi yang termasuk dalam target Wajib Pajak Wajib SPT yang menyampaikan SPT Tahunan PPh diberikan pembobotan 1,2;
- atas SPT Tahunan PPh yang dilaporkan tidak tepat waktu dan/atau selain oleh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi yang termasuk dalam target Wajib Pajak Wajib SPT, diberikan pembobotan 1.

Target WP Badan dan Orang Pribadi yang Wajib SPT pada Pimpinan Unit Kanwil ditetapkan melalui Nota Dinas Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian berdasarkan jumlah WP Wajib SPT pada unit tersebut;

- **Formula IKU**

$$\left[\frac{(1,2 \times \text{jumlah SPT Tahunan PPh tahun pajak 2023 yang disampaikan tepat waktu oleh WP wajib SPT}) + \text{jumlah SPT Tahunan PPh tahun pajak 2023 selain yang disampaikan tepat waktu oleh WP wajib SPT}}{\text{Target WP yang menyampaikan SPT Tahunan PPh tahun pajak 2023}} \right] \times 100\%$$

- **Penjelasan IKU**

Capaian realisasi IKU tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi pada tahun 2024 lebih tinggi dari realisasi pada empat tahun sebelumnya. Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi di tahun 2024 berada di jalur hijau. Realisasi IKU ini berada di angka 120% dari target 100% dengan indeks capaian 120%. Pada tahun 2024 telah ada 1.767 Wajib Pajak yang melaporkan SPT dimana 1.733 merupakan Wajib Pajak Wajib SPT dan 34 merupakan Wajib Pajak Bukan Wajib SPT.

b. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja empat tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	99,56%	99,79%	100,00%	100,00%	120,00%

Sumber: Laporan Nilai Kinerja Organisasi Tahun 2020 - 2024

Dalam 5 tahun terakhir, IKU Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi mengalami peningkatan. Peningkatan tertinggi terjadi pada tahun 2024. Peningkatan ini tidak terlepas dari berubahnya manual IKU dimana pada tahun 2024, Surat Pemberitahuan (SPT) yang dilaporkan tepat waktu diberi poin 1,2 dan pada tahun 2024 juga memperhitungkan pelaporan SPT bukan wajib SPT.

- c. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	-	-	100%	120,00%

Sumber: Dashboard Kinerja Organisasi di Mandor data tanggal 14 Januari 2025 dan Buku Renstra DJP 2020 - 2024

- d. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100%	100%	120,00%

Sumber: Dashboard Kinerja Organisasi di Mandor data tanggal 14 Januari 2025

Persentase SPT Tahunan pada tahun 2024 melebihi target dan memiliki realisasi 120%. Realisasi KPP Madya Surabaya sendiri berada diatas realisasi nasional yaitu sebesar 117,51%. Kinerja baik ini nantinya akan terus dipertahankan oleh KPP Madya Surabaya di tahun 2025.

- e. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

Berbagai upaya telah di dilakukan oleh KPP Madya Surabaya untuk menunjang capaian kinerja realisasi capaian tingkat kepatuhan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja antara lain:

- Melakukan sosialisasi terkait pelaporan SPT pada bulan maret dan april melalui media sosial;
- membuat unggahan pada kanal sosial media KPP Madya Surabaya dan standing banner terkait ajakan pelaporan SPT Tahunan;
- melakukan tindakan persuasif dengan mengirim pesan kepada Wajib Pajak untuk segera melaporkan SPT Tahunan.

- f. Rencana aksi tahun selanjutnya

- Terus melakukan monitoring terkait pelaporan SPT Tahunan di tahun 2025;
- melanjutkan strategi tahun 2024 dengan melakukan sosialisasi pelaporan SPT Tahunan serta melakukan Tindakan persuasif untuk mengingatkan Wajib Pajak agar melaporkan SPT Tahunan.

5. Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)

a. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
Realisasi	20.63%	27.29%	27.29%	55.68%	55.68%	100.14%	100.14%
Capaian	82.52%	54.58%	54.58%	74.24%	74.24%	100.14%	100.14%

Sumber: Dashboard Kinerja Organisasi di Mandor data tanggal 14 Januari 2025

- Deskripsi Sasaran Strategis

Peningkatan voluntary and enforced tax compliance Wajib Pajak sebagai tindak lanjut analisis data dalam rangka kegiatan pengawasan dan penegakan hukum atas tahun pajak sebelum tahun pajak berjalan

- Definisi IKU

Definisi atas penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) beserta masing-masing kegiatannya ditetapkan oleh Kantor Pusat DJP melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak yang mengatur tentang Kebijakan dan Strategi Pengamanan Penerimaan Pajak Nasional. Target penerimaan pajak dari kegiatan PKM Kanwil adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PKM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP dan telah diassesment oleh direktorat teknis terkait yang ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak tentang Target Angka Mutlak IKU Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) dan Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM).

Target penerimaan pajak dari kegiatan PKM KPP adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PKM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP ke Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan dan ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak.

- Formula IKU

Formula:	
Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan PKM	x 100%
Target penerimaan pajak dari kegiatan PKM	

- Penjelasan IKU

Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan pengawasan kepatuhan material sebesar Rp1.436.320.492.993 atau 100,14% dari target sebesar Rp1.434.290.807.000 dan berada di jalur hijau dengan indeks capaian sebesar 100,14. Penerimaan pajak dari kegiatan pengawasan kepatuhan material sendiri terdiri dari 5 komponen yaitu edukasi, pengawasan, pemeriksaan, penegakan hukum, dan penagihan. Walaupun pada 2024 ini mengalami kenaikan realisasi dibandingkan tahun sebelumnya, tetapi KPP Madya Surabaya tetap harus meningkatkan kinerja kedepannya agar IKU persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan PKM ini bukan hanya meningkat dari tahun sebelumnya, tetapi juga dapat melampaui target dan berada di jalur hijau. KPP Madya Surabaya harus memaksimalkan tindakan pengawasan, pemeriksaan dan penagihan mengingat

angka persentase ini dipengaruhi oleh tiga faktor yaitu kegiatan pengawasan, kegiatan pemeriksaan, dan kegiatan penagihan.

- b. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja empat tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	35,99%	120,00%	75,62%	95,11%	100,14%

Sumber: Laporan Nilai Kinerja Organisasi Tahun 2020 – 2024

Capaian realisasi IKU penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) pada tahun 2024 lebih tinggi dari realisasi pada tahun 2020, 2022 dan 2023, namun lebih rendah dari realisasi tahun 2021.

- c. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100%	100%	100%	100,14%

Sumber: Dashboard Kinerja Organisasi di Mandor data tanggal 14 Januari 2025 dan Buku Renstra DJP 2020 – 2024

Tercapainya target IKU Persentase realisasi penerimaan pajak menggambarkan pemulihan aktivitas ekonomi yang semakin menguat. Beberapa hal yang juga melatarbelakangi membaiknya kinerja penerimaan sampai dengan akhir Desember 2024 diantaranya:

- Mayoritas sektor-sektor usaha tumbuh positif;
- Reformasi fiskal sebagai implementasi UU HPP berupa pelaksanaan PPS, penyesuaian tarif PPN, serta PPN PMSE;
- Pertumbuhan yang positing secara kumulatif pada kinerja PKM.

- d. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan	100%	100%	100,14%

Pengujian Kepatuhan Material (PKM)			
------------------------------------	--	--	--

Sumber: Dashboard Kinerja Organisasi di Mandor data tanggal 14 Januari 2025

e. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

Terdapat isu utama terkait IKU persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) di tahun 2024 yaitu pertumbuhan target realisasi penerimaan dari kegiatan PKM yang cukup signifikan dari tahun sebelumnya sedangkan komposisi Wajib Pajak KPP Madya Surabaya tidak terlalu merata sehingga hanya ada 1 Wajib Pajak yang kemungkinan dapat menutup kekurangan tersebut. Akan tetapi, Wajib Pajak tersebut tidak diperiksa pada tahun 2024. Komposisi Wajib Pajak KPP Madya Surabaya juga tidak mengalami perubahan atau penambahan pada tahun 2024 sehingga selain melalui 1 Wajib Pajak tersebut, akan sulit untuk menutup kekurangan target PKM. Namun, berbagai upaya telah dilakukan oleh KPP Madya Surabaya untuk menunjang capaian kinerja realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM). Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja antara lain:

- Melaksanakan/mengikuti IHT terkait tema penggalian potensi sehingga dihasilkan analisis yang komprehensif.;
- melakukan bedah Wajib Pajak untuk saling bertukar informasi dan pengetahuan terkait penggalian potensi.;
- pengawasan transfer pricing dan aksi korporasi;
- pemanfaatan data internal dan eksternal dan aplikasi yang disediakan oleh DJP maupun tools lainnya;
- menindaklanjuti tanggapan WP atas SP2DK yang telah diterbitkan untuk diterbitkan LHP2DK.

f. Rencana aksi tahun selanjutnya

- manfaatan data internal dan eksternal yang disediakan oleh DJP maupun tools lainnya;
- melanjutkan bedah Wajib Pajak untuk saling bertukar informasi dan pengetahuan terkait penggalian potensi.;
- melakukan pengawasan transfer pricing;
- pengoptimalan kegiatan pemeriksaan dan penerbitan LHPt, SP2DK dan LHP2DK.

6. Persentase Perubahan Perilaku Lapor dan Bayar atas Kegiatan Edukasi dan Penyuluhan

a. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	10%	40%	40%	60%	60%	74%	74%
Realisasi	20.63%	57.48%	57.48%	88.80%	88.80%	88.80%	88.80%
Capaian	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%

Sumber: Dashboard Kinerja Organisasi di Mandor data tanggal 14 Januari 2025

- Deskripsi Sasaran Strategis

Peningkatan edukasi tentang hak dan kewajiban perpajakan serta pemberitaan dan informasi positif mengenai perpajakan yang dapat menumbuhkan pengertian Wajib Pajak terhadap masalah-masalah perpajakan. Pelayanan yang profesional, tepercaya, transparan, tepat waktu, dan konsisten sesuai aturan yang berlaku.

- Definisi IKU

Penyuluhan perpajakan adalah suatu upaya dan proses pemberian informasi perpajakan kepada masyarakat, dunia usaha, dan lembaga pemerintah maupun non pemerintah. Edukasi Pajak adalah setiap upaya dan proses mengembangkan serta meningkatkan semua potensi warga negara (jasmani, rohani, moral dan intelektual) untuk menghasilkan perilaku kesadaran perpajakan yang tinggi serta peningkatan pengetahuan dan keterampilan perpajakan agar terdorong untuk paham, sadar, peduli dan berkontribusi dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.

Kegiatan edukasi yang diperhitungkan dalam hal manual IKU ini adalah kegiatan edukasi perpajakan dengan metode penyuluhan langsung secara aktif dan penyuluhan melalui pihak ketiga yang diinisiasi oleh unit kerja. Kegiatan edukasi perpajakan yang dilakukan perekaman dalam aplikasi sisuluh melampaui 30 hari kalender setelah kegiatan edukasi dilakukan atau tidak menyelesaikan tahapan MPKP sesuai ketentuan, tidak diakui sebagai kegiatan penyuluhan yang diperhitungkan dalam capaian IKU. Rasio kegiatan penyuluhan merupakan perbandingan antara jumlah realisasi kegiatan penyuluhan terhadap total rencana kegiatan penyuluhan. Realisasi kegiatan penyuluhan yang dapat diakui sebagai realisasi adalah maksimal sebesar rencana kegiatan penyuluhan yang telah ditetapkan.

- Formula IKU

$$\{(25\% \times \text{Rasio Kegiatan}) + (30\% \times \text{Rasio Perubahan Perilaku Lapor}) + (45\% \times \text{Rasio Perubahan Perilaku Bayar})\}$$

- Penjelasan IKU

Persentase realisasi perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan sebesar 88,80% dari target 74,00% yang ditetapkan. Artinya persentase realisasi persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan memiliki indeks capaian sebesar 120.

b. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja empat tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	-	-	-	84%	88,80%

Sumber: Laporan Nilai Kinerja Organisasi Tahun 2020 - 2024

Capaian realisasi IKU Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan pada tahun 2024 sama dengan realisasi pada tahun sebelumnya yaitu 120%. Pada tahun 2020, 2021 dan 2022 tidak ada IKU tersebut, namun terdapat IKU Persentase efektivitas kegiatan edukasi dan penyuluhan yang mencapai realisasi 120.

- c. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	-	-	74%	88,80%

Sumber: Dashboard Kinerja Organisasi di Mandor data tanggal 14 Januari 2025 dan Buku Renstra DJP 2020 - 2024

- d. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74%	74%	88,80%

Sumber: Dashboard Kinerja Organisasi di Mandor data tanggal 14 Januari 2025

- e. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

Berbagai upaya telah dilakukan oleh KPP Madya Surabaya untuk menunjang capaian kinerja realisasi persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja antara lain:

- Melakukan edukasi dan penyuluhan kepada wajib pajak dengan kata-kata yang mudah dipahami dan dengan pendekatan-pendekatan yang membuat wajib pajak menjadi nyaman;
- melaksanakan IHT pelayanan prima untuk meningkatkan pemahaman terkait cara pelayanan yang baik.

- f. Rencana aksi tahun selanjutnya

- Melakukan pelayanan maksimal pada kegiatan edukasi/penyuluhan baik secara daring maupun luring;
- memaksimalkan edukasi perpajakan secara aktif melalui audio visual.

7. Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan

- a. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	5%	10%	10%	15%	15%	85%	100%
Realisasi	6.21%	12.44%	12.44%	18.00%	18.00%	88,51%	106.51%
Capaian	120%	120%	120%	120%	120%	104.1%	106.51%

Sumber: Dashboard Kinerja Organisasi di Mandor data tanggal 14 Januari 2025

- Deskripsi Sasaran Strategis

Peningkatan edukasi tentang hak dan kewajiban perpajakan serta pemberitaan dan informasi positif mengenai perpajakan yang dapat menumbuhkan pengertian Wajib Pajak terhadap masalah-masalah perpajakan. Pelayanan yang profesional, tepercaya, transparan, tepat waktu, dan konsisten sesuai aturan yang berlaku.

- Definisi IKU

Salah satu indikator keberhasilan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam pencapaian Sasaran Strategis Edukasi, Pelayanan dan Kehumasan yang efektif pada Internal Perspektif diukur dari hasil survei terhadap Wajib Pajak dan stakeholders lainnya. Survei dilaksanakan oleh unit kerja vertikal dan Kantor Pusat DJP. Hasil dalam pelaksanaan survei adalah Laporan Hasil Survei. Realisasi Triwulan I s.d. Triwulan III diperoleh dari hasil survei yang dilaksanakan unit kerja vertikal sebagai berikut.

- Survei kepuasan pelayanan : terkait tingkat kepuasan stakeholders atas pelayanan yang diberikan oleh KPP.
- Survei efektivitas penyuluhan : terkait pemberian informasi atau edukasi perpajakan yang dilakukan oleh KPP.

Kuesioner survei berasal dari Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat. Selain survei yang dilaksanakan oleh unit kerja vertikal, Kantor Pusat DJP melalui Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat bekerja sama dengan pihak surveyor mengadakan Survei Kepuasan Layanan dan Efektivitas Penyuluhan dan Kehumasan untuk realisasi IKU Triwulan IV. Survei tersebut mengukur:

- Tingkat kepuasan pengguna layanan DJP;
- Tingkat efektivitas penyuluhan perpajakan; dan
- Tingkat efektivitas kehumasan perpajakan.

Penghitungan capaian IKU dihitung dengan proporsi survei triwulanan sebesar 5% dan survei nasional tahunan DJP 85%. Realisasi IKU adalah hasil survei terkait kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan.

- Formula IKU

Formula IKU ini menggunakan indeks hasil survei

- Penjelasan IKU

Pada tahun 2024, indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan ini memiliki realisasi sebesar 106,51% dari trajektori yaitu 100% dengan indeks capaian sebesar 106,51.

b. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja empat tahun sebelumnya.

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan	100%	99,22%	117,01%	102,62%	106,51%

Sumber: Laporan Nilai Kinerja Organisasi Tahun 2020 – 2024

Capaian realisasi IKU Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan pada tahun 2024 lebih tinggi dari tahun 2020, 2021 dan 2023, namun lebih rendah dari tahun 2022. Dengan demikian, KPP Madya Surabaya harus senantiasa meningkatkan

lagi kualitas pelayanan yang diberikan karena indeks efektivitas penyuluhan dan pelayanan ini merupakan hasil survei Wajib Pajak mengenai penyuluhan dan pelayanan.

- c. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan	100%	81%	100%	106,51%

Sumber: Dashboard Kinerja Organisasi di Mandor data tanggal 14 Januari 2025 dan Buku Renstra DJP 2020 - 2024

- d. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan	100%	100%	106,51%

Sumber: Dashboard Kinerja Organisasi di Mandor data tanggal 14 Januari 2025

- e. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

Berbagai upaya telah dilakukan oleh KPP Madya Surabaya untuk menunjang capaian kinerja indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan . Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja antara lain:

- Aktif melakukan kegiatan penyuluhan terkait peraturan perpajakan terbaru;
- memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- memastikan permohonan Wajib Pajak diselesaikan sesuai jangka waktu yang ditetapkan;
- memastikan layanan telepon kantor dan telegram dapat dihubungi sebagai salah satu sarana konsultasi Wajib Pajak.

- f. Rencana aksi tahun selanjutnya

- Meningkatkan frekuensi dan kualitas pemeliharaan sarana dan prasarana;
- menambah sarana pendukung yang dibutuhkan oleh Wajib Pajak, serta memastikan lingkungan pelayanan selalu dalam kondisi bersih dan nyaman;
- Memasang poster standar pelayanan dan meningkatkan kejelasan informasi pelayanan melalui berbagai saluran komunikasi;
- Meningkatkan kompetensi petugas di KPP agar dapat menjawab permasalahan Wajib Pajak dengan jelas, tepat, dan tuntas.

8. Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Strategis

a. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%
Realisasi	120.00%	120.00%	120%	117.60%	117.60%	118.34%	118.34%
Capaian	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%

Sumber: Dashboard Kinerja Organisasi di Mandor data tanggal 14 Januari 2025

- Deskripsi Sasaran Strategis

Meningkatkan Kepatuhan Pembayaran Pajak

- Definisi IKU

Pengawasan Pembayaran Masa adalah serangkaian kegiatan pengawasan terhadap penerimaan pajak dalam bentuk pembayaran masa dan tahunan yang terkait dengan aktivitas ekonomi tahun pajak berjalan (jatuh tempo penerimaan di tahun 2024) atas Wajib Pajak Strategis. Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Strategis: adalah penjumlahan Persentase Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti, Persentase Penelitian Kenaikan Angsuran PPh Pasal 25 dan Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan atas Wajib Pajak Strategis.

- Formula IKU

$(\text{Persentase Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti} \times 40\%) +$
 $(\text{Persentase Penelitian Kenaikan Angsuran PPh Pasal 25} \times 30\%) +$
 $(\text{Persentase Tindak Lanjut data Perpajakan Tahun Berjalan} \times 30\%)$

- Penjelasan IKU

Realisasi persentase pengawasan pembayaran masa WP strategis di tahun 2024 adalah 118,34% dari target 90% dengan indeks capaian adalah 120. Persentase pengawasan pembayaran masa WP strategis ini memiliki 3 variabel yaitu daftar nominatif STP yang ditindaklanjuti, Data Perpajakan dan Dinamisasi PPh Pasal 25. Pada Triwulan IV ini realisasi daftar nominatif STP adalah 120%, realisasi data perpajakan adalah 120% dan realisasi dinamisasi PPh Pasal 25 adalah 114,47%.

b. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja empat tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase pengawasan pembayaran masa WP Strategis	-	110,52%	120,00%	120,00%	120,00%

Sumber: Laporan Nilai Kinerja Organisasi Tahun 2020 - 2024

Capaian realisasi IKU Persentase pengawasan pembayaran masa WP Strategis pada tahun 2024 sama dengan tahun 2022 dan 2023 yaitu 120%, dan lebih tinggi dari tahun 2021 yang hanya mencapai 110,52%.

- c. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Persentase pengawasan pembayaran masa WP Strategis	100%	100%	90%	120,00%

Sumber: Dashboard Kinerja Organisasi di Mandor data tanggal 14 Januari 2025 dan Buku Renstra DJP 2020 - 2024

- d. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Persentase pengawasan pembayaran masa WP Strategis	100%	100%	120,00%

Sumber: Dashboard Kinerja Organisasi di Mandor data tanggal 14 Januari 2025

- e. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

Berbagai upaya telah dilakukan oleh KPP Madya Surabaya untuk menunjang capaian kinerja persentase pengawasan pembayaran masa WP Strategis. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja antara lain:

- Melakukan penerbitan STP yang seharusnya diterbitkan;
- melaksanakan forum Account Representative untuk memonitoring capaian IKU persentase pengawasan pembayaran masa WP strategis.

- f. Rencana aksi tahun selanjutnya

- Melaksanakan pengawasan dan penelitian atas angsuran PPh Pasal 25 Wajib Pajak Strategis;
- menindaklanjuti data pemicu/penguji Approweb tahun berjalan;
- memahami dan memanfaatkan aplikasi coretax untuk kegiatan pengawasan tahun 2025;
- melanjutkan pelaksanaan forum Account Representative untuk memonitoring capaian IKU persentase pengawasan pembayaran masa WP strategis.

9. Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Strategis

- a. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	100%	40%	40%	75%	75%	100%	100%
Realisasi	0.00%	43.42%	43.42%	79.23%	79.23%	120.00%	120.00%
Capaian	0.00%	108.55%	108.55%	105.64%	105.64%	120.00%	120.00%

Sumber: Dashboard Kinerja Organisasi di Mandor data tanggal 14 Januari 2025

- Deskripsi Sasaran Strategis

Pengawasan yang didukung teknologi informasi yang terintegrasi, data berkualitas, dan probis yang mumpuni, yang dapat dengan mudah dan cepat mendeteksi ketidakpatuhan Wajib Pajak (subjektif maupun objektif) untuk mendorong kepatuhan sukarela.

- Definisi IKU

Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Strategis merupakan salah satu kegiatan pengawasan atas kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya. Kegiatan permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan dimulai dengan penelitian dan analisis (LHPt), penerbitan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK), dan ditindaklanjuti dengan penerbitan Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (LHP2DK) atas Wajib Pajak Strategis.

Kegiatan Penelitian dan Analisis dilaksanakan sesuai dengan Daftar Prioritas Pengawasan (DPP) yang telah disetujui oleh Komite Kepatuhan Wajib Pajak. Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis adalah penjumlahan realisasi dua komponen:

A. Komponen Penelitian (40%)

B. Komponen Tindak Lanjut (60%)

- Formula IKU

$(40\% \times \text{Capaian Penelitian}) + (60\% \times \text{Capaian Tindak Lanjut})$

- Penjelasan IKU

Realisasi persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP strategis di tahun 2024 adalah 120% dari target 100% dengan indeks capaian 120 dan berada di jalur hijau. IKU ini memiliki 2 variabel yaitu komponen capaian penelitian dan komponen tindak lanjut.

b. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja empat tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Strategis	120%	117,16%	120,00%	117,01%	120,00%

Sumber: Laporan Nilai Kinerja Organisasi Tahun 2020 - 2024

Capaian realisasi IKU Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Strategis pada tahun 2024 sama dengan tahun 2020, 2022 dan lebih tinggi dari tahun 2021 dan 2023 . Pada tahun 2024, KPP Madya meraih realisasi maksimal yaitu 120%. Dengan hasil di tahun 2024, KPP Madya Surabaya bertekad untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja di tahun 2025.

- c. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Strategis	100%	100%	100%	120,00%

Sumber: Dashboard Kinerja Organisasi di Mandor data tanggal 14 Januari 2025 dan Buku Renstra DJP 2020 - 2024

- d. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Strategis	100%	100%	120,00%

Sumber: Dashboard Kinerja Organisasi di Mandor data tanggal 14 Januari 2025

Realisasi IKU persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP strategis di KPP Madya Surabaya pada tahun 2024 adalah 120%. Realisasi ini melebihi target tahun 2024 dan sama dengan realisasi nasional. Realisasi nasional adalah sebesar 120%.

- e. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

Berbagai upaya telah dilakukan oleh KPP Madya Surabaya untuk menunjang capaian kinerja persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP strategis. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja antara lain:

- Melakukan percepatan penerbitan LHPT;
- melakukan inventarisir SP2DK yang potensinya tidak terlalu besar dan berdasarkan penelitian tidak ada tambahan potensi yang signifikan untuk dilakukan percepatan penyelesaian SP2DK;
- melakukan visit/mengundang WP untuk konseling segera setelah jangka waktu 14 hari SP2DK tidak ada respon.
- melaksanakan forum Account Representative untuk memonitoring capaian IKU persentase pengawasan pembayaran masa WP strategis.

- f. Rencana aksi tahun selanjutnya
- melakukan percepatan untuk SP2DK semester I
 - memberikan opsi mengangsur tanpa lewat tahun untuk WP yang tidak bisa langsung melakukan pembayaran penuh atas BA SP2DK yang telah disetujui (jika WP mengalami masalah cashflow);
 - mengusulkan pemeriksaan untuk WP yang perlu dilakukan pendalaman dan potensi di atas 500 juta;
 - melanjutkan forum Account Representative untuk memonitoring capaian IKU persentase pengawasan pembayaran masa WP strategis

10. Persentase Pemanfaatan data selain tahun berjalan

- a. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi	120.00%	117.00%	117.00%	117.36%	117.36%	119.71%	119.71%
Capaian	120.00%	117.00%	117.00%	117.36%	117.36%	119.71%	119.71%

Sumber: Dashboard Kinerja Organisasi di Mandor data tanggal 14 Januari 2025

- Deskripsi Sasaran Strategis
Pengawasan yang didukung teknologi informasi yang terintegrasi, data berkualitas, dan probis yang mumpuni, yang dapat dengan mudah dan cepat mendeteksi ketidakpatuhan Wajib Pajak (subjektif maupun objektif) untuk mendorong kepatuhan sukarela.
- Definisi IKU
IKU Persentase Pemanfaatan Data Selain Tahun Berjalan terdiri dari 2 (dua) komponen yaitu pemanfaatan data STP dan data Matching. Adapun definisi dari masing-masing komponen sebagai berikut:
 - Pemanfaatan Data STP
Persentase Pemanfaatan Data STP adalah persentase perbandingan antara Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti dengan Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti.
 - Pemanfaatan Data Matching
- Formula IKU

$$\frac{(\text{Capaian Pemanfaatan Data STP}) + (\text{Capaian Pemanfaatan Data Matching})}{2}$$
- Penjelasan IKU
Realisasi persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan di tahun 2024 adalah 120% dari target 100% dan berada di jalur hijau. IKU 6b-N ini memiliki 2 variabel yaitu komponen pemanfaatan data STP dan pemanfaatan data matching.

- b. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja empat tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	-	-	-	120,00%	119,71%

Sumber: Laporan Nilai Kinerja Organisasi Tahun 2020 – 2024

Capaian realisasi IKU Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan pada tahun 2024 sedikit lebih rendah dari tahun 2023 dimana realisasi tahun 2023 adalah 120%. Pada tahun 2020, 2021 dan 2022 tidak terdapat IKU persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan.

- c. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	-	-	100%	119,71%

Sumber: Dashboard Kinerja Organisasi di Mandor data tanggal 14 Januari 2025 dan Buku Renstra DJP 2020 - 2024

- d. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100%	100%	119,71%

Sumber: Dashboard Kinerja Organisasi di Mandor data tanggal 14 Januari 2025

Realisasi IKU persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan di KPP Madya Surabaya pada tahun 2024 adalah 120%. Realisasi ini melebihi target tahun 2024 dan sama dengan realisasi nasional. Realisasi nasional adalah sebesar 120%.

- e. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

Berbagai upaya telah dilakukan oleh KPP Madya Surabaya untuk menunjang capaian kinerja persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja antara lain:

- menindaklanjuti dan memanfaatkan data pemicu yang ada;
- melaksanakan forum Account Representative untuk memonitoring capaian IKU pemanfaatan data selain tahun berjalan.

- f. Rencana aksi tahun selanjutnya

- Semua data pemicu harus dimanfaatkan dan ditindaklanjuti agar mendapat nilai dengan tradeoff antara penurunan nilai IKU atau penurunan success rate;
- melakukan evaluasi kembali untuk menentukan langkah terbaik agar IKU ini tetap tercapai di tahun 2025;
- melanjutkan pelaksanaan forum Account Representative untuk memonitoring capaian IKU pemanfaatan data selain tahun berjalan.

11. Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu

a. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi	120.00%	111.30%	111.30%	90.00%	90%	99.17%	99.17%
Capaian	120.00%	111.30%	111.30%	90.00%	90.00%	99.17%	99.17%

Sumber: Dashboard Kinerja Organisasi di Mandor data tanggal 14 Januari 2025

- Deskripsi Sasaran Strategis

Pengawasan yang didukung teknologi informasi yang terintegrasi, data berkualitas, dan probis yang mumpuni, yang dapat dengan mudah dan cepat mendeteksi ketidakpatuhan Wajib Pajak (subjektif maupun objektif) untuk mendorong kepatuhan sukarela.

- Definisi IKU

Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib pajak KPP adalah kegiatan dalam rangka memastikan pelaksanaan tugas komite kepatuhan pada KPP untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu dihitung dari 30% Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu ditambah dengan 40% kualitas pelaksanaan komite kepatuhan ditambah dengan 30% Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan.

- Formula IKU

30% Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu + 40% kualitas pelaksanaan komite kepatuhan + 30% Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan

- Penjelasan IKU

Realisasi efektivitas pengelolaan komite kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu di tahun 2024 adalah 90,00% dari target 100% dan berada di jalur kuning. Efektivitas pengelolaan komite kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu memiliki 3 komponen yaitu:

- LPT KKWP KPP tepat waktu dengan bobot 30%.
- Kualitas pelaksanaan komite kepatuhan memiliki bobot 40%; dan
- Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan dengan bobot 30%

Pada triwulan IV ini, komponen Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu yang memiliki realisasi dibawah target adalah persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan. Komponen ini hanya memiliki capaian 50,56%. Sedangkan 2 komponen lain memiliki indeks capaian diatas 100%.

b. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja empat tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Efektivitas pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	-	-	-	-	99,17%

Sumber: Laporan Nilai Kinerja Organisasi Tahun 2020 – 2024

IKU efektivitas pengelolaan komite kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu ini tergolong IKU baru di tahun 2024. Jadi belum ada IKU ini pada tahun-tahun sebelumnya.

- c. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Efektivitas pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	-	-	100%	99,17%

Sumber: Dashboard Kinerja Organisasi di Mandor data tanggal 14 Januari 2025 dan Buku Renstra DJP 2020 - 2024

- d. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Efektivitas pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100%	100%	99,17%

Sumber: Dashboard Kinerja Organisasi di Mandor data tanggal 14 Januari 2025

- e. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

Terdapat isu utama terkait IKU efektivitas pengelolaan komite kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu yaitu Pertumbuhan target realisasi penerimaan dari kegiatan PKM Pemeriksaan yang cukup signifikan sedangkan komposisi Wajib Pajak KPP Madya Surabaya tidak terlalu merata sehingga hanya ada 1 Wajib Pajak yang kemungkinan dapat menutup kekurangan tersebut. Akan tetapi, Wajib Pajak tersebut tidak diperiksa pada tahun ini. Komposisi Wajib Pajak KPP Madya Surabaya juga tidak mengalami perubahan atau penambahan sehingga selain melalui 1 Wajib Pajak tersebut, akan sulit untuk mencari bahan baku yang dapat menutup target yang telah ditetapkan. Namun, berbagai upaya telah dilakukan oleh KPP Madya Surabaya untuk menunjang capaian kinerja efektivitas pengelolaan komite kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu. KPP Madya Surabaya berusaha untuk melaksanakan tugas komite kepatuhan Wajib Pajak tepat waktu. KPP Madya Surabaya berusaha memaksimalkan komponen 1 dan 2 agar dapat mengurangi dampak ketidaktercapaian komponen 3.

- f. Rencana aksi tahun selanjutnya

Untuk tahun 2025, KPP Madya Surabaya akan melakukan optimalisasi kegiatan bedah WP komprehensif. Selain itu, komponen 1 terkait pelaporan pelaksanaan tugas komite kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu akan dipertahankan dengan realisasi maksimal.

12. Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian

a. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi	117.60%	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%
Capaian	117.60%	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%

Sumber: Dashboard Kinerja Organisasi di Mandor data tanggal 14 Januari 2025

- Deskripsi Sasaran Strategis

Rangkaian kegiatan penegakan hukum yang meliputi pemeriksaan, penagihan, upaya hukum, tindak pidana di bidang perpajakan yang dilaksanakan secara objektif, memberikan kepastian hukum, menimbulkan efek jera, dan mendorong kepatuhan WP.

- Definisi IKU

Efektivitas Pemeriksaan adalah kegiatan pemeriksaan yang diukur berdasarkan nilai SKP terbit tahun berjalan dibandingkan dengan data potensi, nilai SKP disetujui dibandingkan dengan nilai SKP terbit tahun berjalan, realisasi penyelesaian pemeriksaan, penyelesaian pemeriksaan tepat waktu dan ketetapan dibandingkan dengan nilai restitusi. Efektivitas Penilaian adalah kegiatan Penilaian yang diukur berdasarkan penyelesaian penilaian dan penyelesaian penilaian tepat waktu.

Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian diukur dengan dua parameter, yaitu:

- Komponen Tingkat efektivitas pemeriksaan; dan
- Komponen Tingkat efektivitas penilaian.

- Formula IKU

$$(\text{Capaian Komponen Tingkat Efektivitas Pemeriksaan} \times 60\%) + (\text{Capaian Komponen Tingkat Efektivitas Penilaian} \times 40\%)$$

*Keterangan : capaian tiap komponen ditetapkan maksimal 120%

- Penjelasan IKU

IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian berada di jalur hijau pada triwulan IV ini dengan realisasi sebesar 120% dan indeks capaian sebesar 120. IKU 7a-CP ini terdiri dari 2 komponen yaitu pemeriksaan dan penilaian. Untuk komponen pemeriksaan terdiri Terdapat 5 variabel untuk penghitungan IKU Efektivitas Pemeriksaan ini yaitu:

- Nilai SKP Terbit Tahun Berjalan dibandingkan dengan Data Potensi DSPP – Kode Pemeriksaan 1441, 1442 1451, 1452, 1461, 1462, 1161, 1162, 1B11, 1B12,1B21,1B22 dengan bobot 15%.
- Nilai SKP disetujui dibandingkan dengan Nilai SKP Terbit Tahun Berjalan dengan bobot 25%.
- Realisasi Penyelesaian Pemeriksaan - hanya yang dilakukan oleh FPP dengan bobot 30%.
- Persentase Penyelesaian Pemeriksaan tepat waktu - hanya yang dilakukan oleh FPP dengan bobot 25%. Pada variabel ini, perlu diperhatikan kembali terkait definisi tepat waktu.
- Nilai Ketetapan Terbit dibandingkan dengan Nilai Restitusi - hanya All Taxes 1182/1181 dengan bobot 5%.

IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan berada di jalur hijau pada triwulan IV ini dengan indeks capaian sebesar 120%.

- b. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja empat tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	-	-	-	-	120,00%

Sumber: Laporan Nilai Kinerja Organisasi Tahun 2020 – 2024

Capaian realisasi IKU Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian merupakan salah satu IKU baru di tahun 2024. Pada tahun sebelumnya, IKU hanya mencakup tingkat efektivitas pemeriksaan dan belum ada komponen penilaian. Dengan tercapainya realisasi maksimal yaitu 120% di tahun 2024, KPP Madya Surabaya bertekad untuk terus melanjutkan tren positif tersebut di tahun 2025.

- c. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	-	-	100%	120,00%

Sumber: Dashboard Kinerja Organisasi di Mandor data tanggal 14 Januari 2025 dan Buku Renstra DJP 2020 – 2024

- d. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100%	100%	120,00%

Sumber: Dashboard Kinerja Organisasi di Mandor data tanggal 14 Januari 2025

- e. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

Berbagai upaya telah dilakukan oleh KPP Madya Surabaya untuk menunjang capaian kinerja tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja antara lain:

- melakukan monitoring penyelesaian tunggakan pemeriksaan;
- seluruh usulan DSPP dibahas secara komprehensif dalam rapat komite kepatuhan untuk menghasilkan bahan baku pemeriksaan yang berkualitas dengan mempertimbangkan juga ability to pay Wajib Pajak;
- optimalisasi usulan DSPP melalui DSP4 Kolaboratif dengan cara pembuatan KKA yang komprehensif berdasarkan Data IRE;
- pembuatan GamePlan penyelesaian LHP Konversi s.d. Desember 2024;
- pembuatan GamePlan penyelesaian Penilaian s.d. Desember 2024.

- f. Rencana aksi tahun selanjutnya
 - monitoring tunggakan pemeriksaan;
 - pembahasan usulan DSPP melalui rapat Komite Kepatuhan yang tepat arah dan komprehensif;
 - optimisasi usulan DSPP melalui DSP4 Kolaboratif;
 - penyelesaian LHP Konversi tepat waktu sesuai dengan komitmen pada GamePlan Penyelesaian LHP yang telah disusun;
 - penyelesaian Penilaian tepat waktu sesuai dengan komitmen pada GamePlan Penyelesaian LHP Penilaian yang telah disusun

13. Tingkat Efektivitas Penagihan

- a. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	15%	30%	30%	45%	45%	75%	75%
Realisasi	28.00%	51.99%	51.99%	89.02%	89.02%	112.39%	112.39%
Capaian	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%

Sumber: Dashboard Kinerja Organisasi di Mandor data tanggal 14 Januari 2025

- Deskripsi Sasaran Strategis

Rangkaian kegiatan penegakan hukum yang meliputi pemeriksaan, penagihan, upaya hukum, tindak pidana di bidang perpajakan yang dilaksanakan secara objektif, memberikan kepastian hukum, menimbulkan efek jera, dan mendorong kepatuhan WP.
- Definisi IKU

Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.

IKU tingkat efektivitas penagihan dimaksudkan untuk mengukur tingkat keberhasilan tindakan penagihan pajak yang dilakukan terhadap Wajib Pajak/Penanggung Pajak dalam rangka mencairkan piutang pajak. Tingkat efektivitas penagihan terdiri dari 3 (tiga) variabel, yaitu:

 - Variabel tindakan penagihan (50%);
 - Variabel tindak lanjut Daftar Sasaran Prioritas Pencairan (DSPC) (20%);
 - Variabel pencairan Daftar Sasaran Prioritas Pencairan (DSPC) (30%).
- Formula IKU

$$(50\% \times \text{Variabel Tindakan Penagihan}) + (20\% \times \text{Variabel Tindak Lanjut DSPC}) + (30\% \times \text{Variabel Pencairan DSPC})$$
- Penjelasan IKU

Realisasi efektivitas penagihan pada tahun 2024 sebesar 112,39% dari target yaitu 75%. Terdapat 3 variabel untuk penghitungan IKU Efektivitas Penagihan ini yaitu

 - Tindakan Penagihan dengan bobot 50%;
 - Tindak Lanjut Daftar Sasaran Prioritas Pencairan (DSPC) dengan bobot 30%, dan
 - Pencairan Daftar Sasaran Prioritas Pencairan (DSPC) dengan bobot 20%.

- b. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja empat tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Tingkat efektivitas penagihan	-	120,00%	120,00%	120,00%	112,42%

Sumber: Laporan Nilai Kinerja Organisasi Tahun 2020 – 2024

Capaian realisasi IKU Tingkat efektivitas penagihan pada tahun 2024 turun dibandingkan dengan realisasi pada tiga tahun terakhir yaitu 120,00%. Akan tetapi indeks capaian tahun 2024 sama dengan 3 tahun sebelumnya yaitu 120%. Dengan demikian, KPP Madya Surabaya bertekad untuk melanjutkan tren positif tersebut di tahun 2025.

- c. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Tingkat efektivitas penagihan	-	-	75%	112,42%

Sumber: Dashboard Kinerja Organisasi di Mandor data tanggal 14 Januari 2025 dan Buku Renstra DJP 2020 - 2024

- d. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Tingkat efektivitas penagihan	75%	75%	112,42%

Sumber: Dashboard Kinerja Organisasi di Mandor data tanggal 14 Januari 2025

- e. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

Berbagai upaya telah dilakukan oleh KPP Madya Surabaya untuk menunjang capaian kinerja tingkat efektivitas penagihan. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja antara lain:

- mengoptimalkan tindakan penagihan pajak melalui Pemberitahuan SP, SPMP, dan Pemblokiran Rekening Bank;
- melakukan adjustment nilai DSPC sesuai dengan kondisi profil Wajib Pajak dilapangan.

- f. Rencana aksi tahun selanjutnya

KPP Madya Surabaya akan melanjutkan tren positif untuk tahun 2025. KPP Madya Surabaya bertekad mempertahankan atau bahkan meningkatkan kinerja yang telah baik selama tahun 2021 hingga 2024. KPP Madya Surabaya akan meningkatkan efektivitas tindakan penagihan. Kegiatan yang dapat dijadikan prioritas adalah pemblokiran rekening Wajib Pajak/Penangguang Pajak serta selalu melakukan pembaruan terkait profil Wajib Pajak untuk mengetahui risiko keamanan/keselamatan

JSPN dalam melakukan kegiatan penagihan ke tempat usaha kedudukan Wajib Pajak & mengetahui secara detail terkait kegiatan usaha Wajib Pajak.

14. Persentase Penyampaian Usul Pemeriksaan Bukti Permulaan

- a. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
Realisasi	100%	100%	100%	200%	200%	200%	200%
Capaian	120%	120%	120%	120%	120%	120%	120%

Sumber: Dashboard Kinerja Organisasi di Mandor data tanggal 14 Januari 2025

- Deskripsi Sasaran Strategis

Rangkaian kegiatan penegakan hukum yang meliputi pemeriksaan, penagihan, upaya hukum, tindak pidana di bidang perpajakan yang dilaksanakan secara objektif, memberikan kepastian hukum, menimbulkan efek jera, dan mendorong kepatuhan WP.

- Definisi IKU

Pemeriksaan Bukti Permulaan dilakukan berdasarkan pengembangan dan analisis melalui kegiatan intelijen atau kegiatan lain. Pengembangan dan analisis melalui kegiatan lain dilakukan melalui kegiatan pengawasan, pemeriksaan, pengembangan Pemeriksaan Bukti Permulaan, atau pengembangan Penyidikan, dengan hasil berupa Laporan yang memuat usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan. Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang disampaikan harus dilakukan Koordinasi dan/atau Case Building terlebih dahulu dengan Kanwil DJP untuk memastikan kualitas usulan agar dapat ditindaklanjuti dengan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang disampaikan harus memuat informasi minimal yang tercantum dalam formulir usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan. Target penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan adalah sebanyak 1 (satu) usulan yang disetujui untuk ditindaklanjuti dengan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

- Formula IKU

Formula:	
Realisasi Penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan ke Kantor Wilayah	x 100%
Target Penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan ke Kantor Wilayah	

- Penjelasan IKU

IKU Persentase Penyampaian Usul Pemeriksaan Bukti Permulaan berada di jalur hijau pada triwulan IV dengan indeks capaian sebesar 120. IKU ini merupakan IKU baru yang muncul di tahun 2024. Menurut Manual IKU, target penyampaian usul pemeriksaan bukti permulaan sebanyak 1 usulan yang disetujui untuk ditindaklanjuti dengan pemeriksaan bukti permulaan. Pada tahun 2024 ini, KPP Madya Surabaya memiliki 2 penyampaian usul pemeriksaan bukti permulaan.

- b. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja empat tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	-	-	-	-	120,00%

Sumber: Laporan Nilai Kinerja Organisasi Tahun 2020 - 2024

IKU ini merupakan IKU baru yang muncul di tahun 2024 dan belum ada di tahun sebelumnya. Realisasi pada tahun 2024 adalah 120%. Dengan capaian tersebut, KPP Madya Surabaya bertekad untuk mempertahankan tren positif tersebut pada tahun 2025.

- c. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	-	-	100%	120,00%

Sumber: Dashboard Kinerja Organisasi di Mandor data tanggal 14 Januari 2025 dan Buku Renstra DJP 2020 - 2024

- d. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100%	100%	120,00%

Sumber: Dashboard Kinerja Organisasi di Mandor data tanggal 14 Januari 2025

- e. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

Berbagai upaya telah dilakukan oleh KPP Madya Surabaya untuk menunjang capaian kinerja persentase penyampaian usul pemeriksaan bukti permulaan. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja antara lain:

- melakukan penelitian Wajib Pajak secara komprehensif;
- pembahasan atas pelaksanaan permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan dengan Wajib Pajak;
- pengusulan Pemeriksaan Bukti Permulaan ke Kantor Wilayah DJP Jawa Timur I.

- f. Rencana aksi tahun selanjutnya
- melanjutkan penelitian Wajib Pajak secara komprehensif;
 - mengusulkan pemeriksaan bukper jika menemukan indikasi pidana di bidang perpajakan saat melakukan penelitian Wajib Pajak.

15. Persentase Penyelesaian Laporan Pengamatan dan Produksi Alat Keterangan

- a. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	25%	50%	50%	80%	80%	100%	100%
Realisasi	31.00%	91.00%	91.00%	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%
Capaian	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%

Sumber: Dashboard Kinerja Organisasi di Mandor data tanggal 14 Januari 2025

- Deskripsi Sasaran Strategis
Data, informasi, dan insight yang mampu memberikan nilai tambah untuk mendukung pengambilan keputusan.
- Definisi IKU

IKU Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan adalah rata-rata dari realisasi Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan dan Persentase penyediaan data potensi perpajakan. Adapun definisi dari masing-masing komponen sebagai berikut:

➤ Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan

Kegiatan Intelijen Perpajakan adalah serangkaian kegiatan dalam siklus intelijen yang meliputi perencanaan, pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data dan/atau informasi sehingga diperoleh suatu produk intelijen yang dapat digunakan untuk kepentingan perpajakan.

Kegiatan Pengamatan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Petugas Pengamat tanpa diketahui sasaran yang bertujuan untuk mendapatkan dan memperoleh data dan/atau informasi berupa fakta, keadaan, dan atau/kejadian yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan perpajakan.

➤ Produksi Alat Keterangan

Alat Keterangan yang selanjutnya disebut Alket adalah data dan/atau informasi yang spesifik terkait suatu Wajib Pajak yang dimiliki dan/atau diperoleh DJP dari berbagai sumber, baik sumber internal maupun eksternal, dalam rangka pelaksanaan dan/atau selain pelaksanaan tugas dan fungsi Unit di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak untuk dilakukan pemanfaatan data oleh selain unit pemroduksi Alket terutama untuk penggalan potensi perpajakan.

Produksi alket adalah kegiatan perekaman data berupa formulir alket melalui aplikasi SIDJP NINE Alket SE-12 atau aplikasi lainnya yang ditentukan yang diperoleh dalam rangka pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Account Representative terhadap Wajib Pajak baik yang telah memiliki NPWP maupun yang belum memiliki NPWP.

- Formula IKU

(Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan

+ Produksi Alat Keterangan)

$$\frac{\quad}{2} \times 100\%$$

- Penjelasan IKU

IKU Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Produksi Alat Keterangan pada tahun 2024 berada di jalur hijau dengan indeks capaian sebesar 120. KPP Madya telah melakukan 7 kali kegiatan pengamatan dari target yang telah ditetapkan yaitu 4. Kemudian untuk produksi alat keterangan memiliki realisasi sebesar 120%.

- b. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja empat tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Produksi Alat Keterangan	-	-	-	-	120,00%

Sumber: Laporan Nilai Kinerja Organisasi Tahun 2020 – 2024

IKU ini termasuk IKU baru di tahun 2024. Pada tahun 2020, 2021, dan 2022 tidak terdapat IKU tersebut. Pada tahun 2023 terdapat IKU pengamatan akan tetapi tidak ada komponen produksi Alat Keterangan. Pada tahun 2023, persentase penyelesaian laporan pengamatan memiliki realisasi 120.

- c. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Produksi Alat Keterangan	-	-	100%	120,00%

Sumber: Dashboard Kinerja Organisasi di Mandor data tanggal 14 Januari 2025 dan Buku Renstra DJP 2020 - 2024

- d. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Produksi Alat Keterangan	100%	100%	120,00%

Sumber: Dashboard Kinerja Organisasi di Mandor data tanggal 14 Januari 2025

e. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

Berbagai upaya telah dilakukan oleh KPP Madya Surabaya untuk menunjang capaian kinerja persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Produksi Alat Keterangan. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja antara lain:

- melaksanakan pengamatan terhadap wajib pajak untuk mendapatkan data/informasi yang berguna;
- membuat laporan dan mengirimkan ke kanwil.

f. Rencana aksi tahun selanjutnya

- Meningkatkan kualitas pengamatan di tahun 2025 untuk mendapatkan data/informasi yang lebih berkualitas;
- memanfaatkan data/informasi yang diperoleh untuk kegiatan penggalan potensi.

16. Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan kegiatan Kebintalan SDM

a. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	100	100	100	100	100	100	100
Realisasi	118	120	120	120	120	117	117
Capaian	118%	120%	120%	120%	120%	117%	117%

Sumber: Dashboard Kinerja Organisasi di Mandor data tanggal 14 Januari 2025

- Deskripsi Sasaran Strategis

Upaya perbaikan organisasi untuk mencapai ketangguhan, responsivitas, dan fleksibilitas optimal dalam menghadapi perubahan dinamis di lingkungan Kementerian Keuangan melalui pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan organisasi yang proaktif, inovatif, dan kolaboratif menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan berkelanjutan.

- Definisi IKU

Terdapat 2 komponen, antara lain:

- Kualitas Kompetensi

Kualitas Kompetensi terdiri dari 3 aspek antara lain kualitas kompetensi pejabat yang diukur berdasarkan pemenuhan kompetensi manajerial dan sosial kultural pejabat struktural dan pengembangannya; kualitas kompetensi pelaksana dan fungsional yang diukur berdasarkan pemenuhan kompetensi teknis pelaksana dan fungsional serta pengembangannya; dan pengembangan kompetensi pegawai yang diukur berdasarkan pemenuhan standar jam pelajaran pegawai

- Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM

Mewujudkan implementasi kebintalan di lingkungan Kementerian Keuangan melalui program/kegiatan kebintalan, sehingga pegawai menerapkan sikap dan perilaku/kebiasaan yang mencerminkan 4 (empat) bidang bintal yakni bintal ideologi, bidang rohani, bidang kompetensi, bidang kejiwaan berdasarkan KMK No.467/KMK.01/2023 tentang Pembinaan Mental di Lingkungan Kementerian Keuangan, sehingga terbentuk pegawai Kementerian Keuangan yang berjiwa nasionalisme, berintegritas, unggul, dan memiliki kesehatan fisik dan mental yang optimal.

- Formula IKU
(Realisasi Aspek 1 x 30%) + (Realisasi Aspek 2 x 35%) + (Realisasi Aspek 3 x 35%)
- Penjelasan IKU

IKU Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM berada di jalur hijau pada tahun 2024 dengan indeks capaian sebesar 117,14. Bobot masing-masing komponen adalah 50%:50%. IKU Standar Kompetensi sendiri dapat digunakan untuk mengukur batas minimal kompetensi yang diperlukan pegawai dalam melaksanakan tugas jabatan yang diukur berdasarkan Assesment Center Pejabat Eselon IV dan IV, Uji Kompetensi Teknis Kenaikan Jenjang dan Jabatan Fungsional Tahun 2024. Berdasarkan data hasil Assesment center dan uji kompetensi di tahun 2024, semua pegawai KPP Madya Surabaya berhasil lulus dan memiliki nilai diatas standar. Hal ini tidak terlepas dari pengembangan kompetensi yang diberikan kepada seluruh pegawai seperti In House Training, Seminar, Focus Group Discussion (FGD), Sharing Session, maupun pelatihan lainnya.

- b. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja empat tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM	-	-	-	-	117,14%

Sumber: Laporan Nilai Kinerja Organisasi Tahun 2020 – 2024

IKU ini merupakan salah satu IKU yang dikombinasikan di tahun 2024. Pada tahun sebelumnya tidak ada IKU ini melainkan IKU Persentase pegawai yang memenuhi standar kompetensi. Dengan tercapainya realisasi 117,14% di tahun 2024, KPP Madya Surabaya akan berusaha meningkatkan realisasi pada tahun 2025 agar mendapatkan hasil yang maksimal.

- c. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM	-	100	100%	117,14%

Sumber: Dashboard Kinerja Organisasi di Mandor data tanggal 14 Januari 2025 dan Buku Renstra DJP 2020 - 2024

- d. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM	100%	100%	117,14%

Sumber: Dashboard Kinerja Organisasi di Mandor data tanggal 14 Januari 2025

e. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

Berbagai upaya telah dilakukan oleh KPP Madya Surabaya untuk menunjang capaian kinerja tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja antara lain:

- melaksanakan kegiatan bimbingan mental di bidang rohani, ideologi, kompetensi, dan kejiwaan;
- melakukan monitoring dan menghimbau kepada pegawai untuk menyelesaikan jamlat pegawai;
- menyelenggarakan IHT dan/atau forum untuk meningkatkan kualitas pegawai KPP Madya Surabaya

f. Rencana aksi tahun selanjutnya

- melaksanakan kegiatan bimbingan mental di bidang rohani, ideologi, kompetensi, dan kejiwaan di tahun 2025;
- melanjutkan penyelenggaraan IHT dan/atau forum untuk meningkatkan kualitas pegawai KPP Madya Surabaya.

17. Indeks Penilaian Integritas Unit

a. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	N/A	N/A	N/A	85	85	85	85
Realisasi	N/A	N/A	N/A	100	100	94.11	94.11
Capaian	N/A	N/A	N/A	117.65%	117.65%	110.72%	110.72%

Sumber: Dashboard Kinerja Organisasi di Mandor data tanggal 14 Januari 2025

- Deskripsi Sasaran Strategis

Upaya perbaikan organisasi untuk mencapai ketangguhan, responsivitas, dan fleksibilitas optimal dalam menghadapi perubahan dinamis di lingkungan Kementerian Keuangan melalui pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan organisasi yang proaktif, inovatif, dan kolaboratif menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan berkelanjutan.

- Definisi IKU

IKU ini mengukur Indeks Penilaian Integritas Organisasi dengan cara mengukur tingkat capaian indeks yang bersumber dari 4 komponen utama survei kepada responden eksternal (Wajib Pajak), yaitu sebagai berikut:

- pelayanan perpajakan;
- pengawasan kepatuhan;
- pemeriksaan pajak;
- penagihan pajak.

Survei dilakukan kepada responden eksternal (Wajib Pajak) secara proporsional yang menerima layanan pada masing-masing kriteria (pelayanan, pengawasan, pemeriksaan, dan penagihan) yang dilakukan oleh Unit Kerja.

Perangkat survei disediakan oleh Direktorat KITSDA. Ketentuan mengenai pelaksanaan survei diatur lebih lanjut dengan Nota Dinas Direktur KITSDA.

- Formula IKU

$$((25\% \times \text{indeks pelayanan perpajakan}) + (25\% \times \text{indeks pengawasan kepatuhan}) + (25\% \times \text{indeks pemeriksaan pajak}) + (25\% \times \text{indeks penagihan pajak})) - \text{Faktor Koreksi}$$

- Penjelasan IKU

Pada triwulan IV ini, IKU indeks penilaian integritas unit berada di jalur hijau dengan realisasi 94,11 dari target 85 dan indeks capaian 110,72.

b. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja empat tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Indeks Penilaian Integritas Unit	-	114,88%	111,08%	112,40%	110,72%

Sumber: Laporan Nilai Kinerja Organisasi Tahun 2020 - 2024

Capaian realisasi IKU Indeks Penilaian Integritas Unit pada tahun 2024 lebih rendah dari realisasi pada tiga tahun sebelumnya. Meskipun lebih rendah akan tetapi realisasi di tahun ini masih berada diatas target yang telah ditetapkan. Salah satu yang membedakan IKU ini dari tahun sebelumnya adalah jumlah responden yang di survei. Pada tahun 2024 ini, jumlah responden yang disurvei mengalami kenaikan drastis hingga 300%. Pada tahun 2023, responden yang diminta hanya 10 Wajib Pajak setiap proses bisnis. Pada tahun 2024 naik menjadi 30 Wajib Pajak setiap proses bisnis. Pada tahun 2024 ini juga IKU indeks penilaian integritas unit memiliki periode pelaporan triwulanan dimana sebelumnya periode pelaporannya adalah tahunan.

c. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Indeks Penilaian Integritas Unit	-	-	85%	110,72%

Sumber: Dashboard Kinerja Organisasi di Mandor data tanggal 14 Januari 2025 dan Buku Renstra DJP 2020 - 2024

d. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Indeks Penilaian Integritas Unit	100%	100%	110,72%

Sumber: Dashboard Kinerja Organisasi di Mandor data tanggal 14 Januari 2025

e. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

Berbagai upaya telah dilakukan oleh KPP Madya Surabaya untuk menunjang capaian kinerja indeks penilaian integritas unit. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja antara lain:

- memutar video kode etik dan kode perilaku saat pelaksanaan *morning activity*;
- memonitoring pengisian survei pada triwulan IV;

f. Rencana aksi tahun selanjutnya

- mengevaluasi hasil SPIU di tahun sebelumnya untuk mempertahankan dan meningkatkan indeks penilaian integritas unit;
- mengevaluasi hasil SPIU di tahun sebelumnya agar dapat menjadi bahan evaluasi dan perbaikan;

18. Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko

a. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	23	47	47.00	70	70	90	90
Realisasi	44	54.93	54.93	85.79	85.79	98.5	98.5
Capaian	120%	117%	117%	120%	120%	109%	109%

Sumber: Dashboard Kinerja Organisasi di Mandor data tanggal 14 Januari 2025

- Deskripsi Sasaran Strategis

Upaya perbaikan organisasi untuk mencapai ketangguhan, responsivitas, dan fleksibilitas optimal dalam menghadapi perubahan dinamis di lingkungan Kementerian Keuangan melalui pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan organisasi yang proaktif, inovatif, dan kolaboratif menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan berkelanjutan.

- Definisi IKU

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 300/KMK.01/2022 tentang Manajemen Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan, antara lain diatur bahwa:

- Manajemen kinerja merupakan rangkaian kegiatan mengoptimalkan sumber daya untuk meningkatkan kinerja organisasi dan pegawai dalam rangka mencapai tujuan organisasi.
- Manajemen kinerja dilakukan berdasarkan prinsip objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan.
- Ruang lingkup manajemen kinerja terdiri atas klasifikasi manajemen kinerja, struktur manajemen kinerja, kerangka kerja sistem manajemen kinerja, dan sistem informasi manajemen kinerja.
- Klasifikasi manajemen kinerja terdiri atas manajemen kinerja organisasi, yakni manajemen kinerja dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi untuk mencapai tujuan organisasi dalam periode tertentu, dan manajemen kinerja pegawai yakni manajemen kinerja dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi, penugasan lainnya sesuai kebutuhan organisasi, serta perilaku kerja pegawai selama periode tertentu.

Indeks Implementasi Manajemen Kinerja diukur dari 2 komponen sebagai berikut:

➤ Indeks Pelaksanaan Program Budaya Kinerja

Budaya kinerja merupakan budaya kerja yang berorientasi pada peningkatan kinerja individu dan organisasi. Program budaya kinerja diterapkan untuk memperkuat kesadaran pegawai DJP dalam meningkatkan kinerja dan kompetensinya dalam rangka pencapaian tujuan organisasi yang pada akhirnya diharapkan mampu mewujudkan sebuah pelaksanaan manajemen kinerja yang adil dan objektif. Indeks pelaksanaan program budaya kinerja diukur dari 2 (dua) kegiatan yaitu pelaksanaan penyampaian imbauan terkait manajemen kinerja dan pelaksanaan Dialog Kinerja Organisasi (DKO).

➤ Indeks Kualitas Pengelolaan Kinerja

Indeks kualitas pengelolaan kinerja diperlukan untuk mengukur efektivitas pengelolaan kinerja organisasi maupun pegawai di lingkungan DJP yang telah berjalan selama ini. Pengukuran kualitas pengelolaan kinerja akan dilaksanakan oleh Direktorat KITSDA dan Sekretariat Direktorat Jenderal, dengan mekanisme yang akan disampaikan kemudian. Hasil pengukuran berupa indeks kualitas pengelolaan kinerja menjadi dasar penghitungan capaian IKU K-3 Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja Kepala Kantor Pelayanan Pajak. Ketentuan lebih lanjut terkait indeks kualitas pengelolaan kinerja akan disampaikan melalui Nota Dinas Direktur KITSDA.

Risiko adalah kemungkinan terjadinya suatu peristiwa yang berdampak terhadap pencapaian sasaran organisasi. Manajemen risiko adalah proses sistematis dan terstruktur yang didukung budaya sadar risiko untuk mengelola risiko organisasi pada tingkat yang dapat diterima guna memberikan keyakinan yang memadai dalam pencapaian sasaran organisasi, yang bertujuan untuk meningkatkan kemungkinan pencapaian visi, misi, sasaran organisasi, dan peningkatan kinerja serta melindungi dan meningkatkan nilai tambah organisasi.

Proses manajemen risiko sesuai dengan KMK-105/KMK.01/2022 adalah Identifikasi Risiko, Analisis Risiko, Evaluasi Risiko, Mitigasi Risiko, dan Pemantauan dan Reviu. Rencana Mitigasi Risiko merupakan rencana tindakan yang bertujuan untuk menurunkan dan/atau menjaga Besaran dan/atau Level Risiko Utama hingga mencapai Risiko Residual Harapan. Pemantauan rencana mitigasi risiko dilakukan triwulanan pada bulan April, Juli, Oktober, dan Januari Tahun berikutnya.

- Formula IKU

Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko = Indeks Implementasi Manajemen Kinerja + Indeks Implementasi Manajemen Risiko

- Penjelasan IKU

IKU Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko berada di jalur hijau pada triwulan IV ini dengan indeks capaian sebesar 109,44. Realisasi IKU ini adalah 98,5 dari trajectory triwulan IV yaitu 90. Terdapat 2 komponen penghitungan IKU ini yaitu indeks efektivitas implementasi

manajemen kinerja dengan bobot 50% dan indeks efektivitas implementasi Manajemen Risiko dengan bobot 50%.

- b. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja empat tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	-	-	-	-	109,44%

Sumber: Laporan Nilai Kinerja Organisasi Tahun 2020 – 2024

IKU ini merupakan salah satu IKU yang di modifikasi pada tahun 2024. Pada tahun 2021, 2022, dan 2023, terdapat IKU yang mirip yaitu IKU Persentase efektivitas Dialog Kinerja Organisasi dan rencana Mitigasi Risiko yang selesai dijalankan/ Persentase efektivitas Dialog Kinerja Organisasi dan penerapan Manajemen Risiko yang telah memenuhi target. Dengan realisasi yang melebihi target di tahun 2024, KPP Madya Surabaya bertekan untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja IKU ini di tahun 2025

- c. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	-	-	90%	109,44%

Sumber: Dashboard Kinerja Organisasi di Mandor data tanggal 14 Januari 2025 dan Buku Renstra DJP 2020 - 2024

- d. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	100%	100%	109,44%

Sumber: Dashboard Kinerja Organisasi di Mandor data tanggal 14 Januari 2025

e. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

Berbagai upaya telah dilakukan oleh KPP Madya Surabaya untuk menunjang capaian kinerja indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja antara lain:

- Melakukan koordinasi terkait pembuatan piagam risiko di awal tahun dengan semua seksi;
- melakukan koordinasi terkait pelaksanaan mitigasi risiko dengan seksi terkait;
- melaporkan pelaksanaan mitigasi risiko tepat waktu;
- pembahasan nilai kinerja organisasi dan mitigasi risiko melalui rapat DKRO tepat waktu;
- membuat dokumen pendukung pelaksanaan DKRO tepat waktu.

f. Rencana aksi tahun selanjutnya

- melanjutkan koordinasi yang baik dengan semua seksi terkait pembuatan piagam risiko di awal tahun dan pelaksanaan mitigasi risiko tiap triwulan;
- melaksanakan rapat DKRO dan pembuatan dokumen pendukung pelaksanaan DKRO tepat waktu;
- melakukan penghitungan IKU secara manual untuk dokumen pendukung saat pelaksanaan rapat DKRO.

19. Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran

a. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	100	100	100	100	100	100	100
Realisasi	104.71	105.00	105.00	120.00	120.00	120	120
Capaian	104.71%	105.00%	105.00%	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%

Sumber: Dashboard Kinerja Organisasi di Mandor data tanggal 14 Januari 2025

- Deskripsi Sasaran Strategis

Pengaturan yang dimaksudkan untuk meningkatkan transparansi, akurasi, dan keteraturan dalam pengelolaan keuangan organisasi. Dengan fokus pada akuntabilitas, organisasi berkomitmen untuk mengimplementasikan praktik pengelolaan keuangan yang jelas dan terukur sehingga organisasi dapat memastikan bahwa kebijakan dan keputusan keuangan diambil berdasarkan informasi yang dapat dipercaya.

- Definisi IKU

Dana yang tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA), harus dikelola sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan anggaran menggunakan prinsip hemat, efisien, dan tidak mewah dengan tetap memenuhi output sebagaimana telah direncanakan dalam DIPA. Ruang lingkup perhitungan IKU Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran dalam ketentuan pada PMK 62 TAHUN 2023 pasal (7). Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran merupakan hasil penjumlahan dari:

- 50% (lima puluh persen) dari nilai kinerja atas perencanaan anggaran; dan
- 50% (lima puluh persen) dari nilai kinerja atas pelaksanaan anggaran.

Penghitungan Nilai Efisiensi pada Aplikasi SMArT DJA menggunakan ketentuan persetujuan Standar Biaya Keluaran Umum berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI No 113 Tahun 2023 dan berdasarkan Nota Dinas dari Biro Perencanaan dan Keuangan nomor ND-777/SJ.1/2024 tanggal 25 Juli 2024 tentang Penetapan Rincian Output yang Diwajibkan Menggunakan Standar Biaya Keluaran Umum Sebagai Dasar Penilaian Kinerja Perencanaan Anggaran TA 2024 ditetapkan untuk

penghitungan efisiensi satuan kerja Kantor Wilayah dan Kantor Pelayanan Pajak dilingkungan DJP menggunakan RO Layanan Kehumasan dan Informasi. Sehingga RO yang ada pada satuan kerja Kanwil dan KPP untuk dilakukan perhitungan efisiensi adalah pada RO Layanan Penyuluhan dan Kehumasan Perpajakan.

- **Formula IKU**

Perhitungan IKU Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran ini mengacu pada PMK 62 TAHUN 2023 pasal (7).

- **Penjelasan IKU**

IKU Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran sampai dengan triwulan IV memiliki capaian sebesar 120 dan berada di jalur hijau. Pada triwulan IV, perhitungan IKU ini terjadi perubahan dibanding dengan triwulan sebelumnya dimana penghitungan indeks kinerja kualitas pelaksanaan terdiri dari 2 komponen yaitu IKPA dan SMART. Bobot masing-masing komponen adalah 50% seperti pada gambar sebagai berikut:

Triwulan IV = (50% x SMART + 50% x IKPA) dengan nilai NKA target 91,0 (indeks 100), dengan indeks sebagai berikut:			
Indeks	Kriteria		
120	Realisasi NKA $\geq$ 95,00		
$100 < X < 120$	$100 + (\text{Realisasi} - 91) : 0,2^* (91 < x < 95)$		
100	Realisasi NKA = 91		
$80 < X < 100$	$80 + (\text{Realisasi NKA} - 80) : 0,55^{**} (80 < x < 91)$		
80	Realisasi NKA = 80		
79,9	Realisasi NKA < 80		

* Koefisien 0,2 = $(\text{Realisasi NKA Capaian 120} - \text{Target NKA}) / (\text{indeks capaian 120} - \text{indeks capaian sesuai target})$
 $= (95-91) / (120-100)$

** Koefisien 0,55 = $(\text{Target NKA} - \text{Realisasi NKA Capaian 80}) / (\text{indeks capaian target} - \text{indeks capaian 80})$
 $= (91-80) / (100-80)$

b. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja empat tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	98,94%	97,87%	97,92%	114,15%	120,00%

Sumber: Laporan Nilai Kinerja Organisasi Tahun 2020 – 2024

IKU indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran merupakan salah satu IKU yang dimodifikasi pada tahun 2023. Sebelumnya IKU ini bernama persentase kualitas pelaksanaan anggaran. Pada tahun 2020, target IKU persentase kualitas pelaksanaan anggaran adalah 95%, sedangkan pada 2021 dan 2022 targetnya adalah 95,5%. Capaian realisasi IKU Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran pada tahun 2024 lebih tinggi dari realisasi tahun sebelumnya. Hal ini tidak terlepas dari koordinasi yang baik dari tim keuangan dengan semua pihak. Pada tahun 2025 ini, KPP Madya Surabaya akan mempertahankan dan meningkatkan tren positif ini sehingga IKU indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran dapat kembali tercapai dengan maksimal.

- c. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	-	95,5%	100%	120,00%

Sumber: Dashboard Kinerja Organisasi di Mandor data tanggal Januari 2025 dan Buku Renstra DJP 2020 - 2024

- d. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100%	100%	120,00%

Sumber: Dashboard Kinerja Organisasi di Mandor data tanggal Januari 2025

- e. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

Berbagai upaya telah dilakukan oleh KPP Madya Surabaya untuk menunjang capaian kinerja indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja antara lain:

- melakukan rewiu DIPA secara periodik (minimal triwulanan) untuk melihat kesesuaian alokasi Program/Kegiatan/Output dalam.
- memprioritaskan penggunaan UP KKP untuk memenuhi kebutuhan operasional Perjalanan Dinas
- memastikan Rencana Penarikan Dana menjadi alat kendali sebagai penyerapan setiap bulannya.
- memonitor status data untuk pengiriman Capaian Output pada aplikasi OMSPAN dan memastikan status data telah Terkonfirmasi.
- melakukan Rapat pengelola keuangan secara berkala.

- f. Rencana aksi tahun selanjutnya

- melakukan revisi RPD setiap triwulan, untuk menyesuaikan dengan kondisi realisasi anggaran
- memastikan Penyerapan Anggaran Setiap Bulan Sesuai Dengan Halaman III DIPA
- menggunakan aplikasi Sakti, Smart DJPb, dan OMSPAN untuk memastikan kesesuaian capaian output dengan realisasi anggaran.
- memprioritaskan penggunaan UP KKP untuk memenuhi kebutuhan operasional Perjalanan DINas
- mengklasifikasikan jenis revisi yang dapat mempengaruhi IKPA dan jenis revisi yang tidak mempengaruhi nilai IKPA. Sehingga bisa memastikan revisi yang diajukan.
- melakukan Rapat Pengelola Keuangan.

Analisis terhadap pencapaian sasaran yang diharapkan oleh KPP Madya Surabaya menyimpulkan bahwa masih terdapat realisasi dari indikator sasaran Rencana Strategis Tahun 2024 yang belum optimal. Oleh karena itu, KPP Madya Surabaya berkomitmen untuk terus memperbaiki kinerja sehingga di tahun mendatang semua indikator sasaran dalam Rencana Strategis dapat tercapai optimal.

B. Realisasi Anggaran

1. Bagian Anggaran 15

1.1. Pendapatan Kantor Pelayanan Pajak Madya Surabaya

Pendapatan Kantor Pelayanan Pajak Madya Surabaya terdiri dari (1) Penerimaan Perpajakan; dan (2) Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Komposisi realisasi anggaran Satuan Kerja Tahun Anggaran 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1
Realisasi Penerimaan Tahun Anggaran 2024
(dalam rupiah)

No.	Jenis Penerimaan	Target	Realisasi	%
1	Penerimaan Perpajakan	21.117.723.197.000	21.124.684.725.208	100,03
2	Penerimaan Negara Bukan Pajak	0	41.150.000	0
Jumlah Penerimaan Pajak dan PNBP		21.117.723.197.000	21.124.725.875.208	100,03

Tabel 2
Realisasi Penerimaan Pajak Tahun Anggaran 2024
(dalam rupiah)

Jenis Pajak	Target	Realisasi	%
Pendapatan Pajak Penghasilan	4.948.359.676.000	5.172.927.265.420	104,54
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai	16.167.787.841.000	15.950.076.388.189	98,65
Pendapatan Pajak Lainnya	1.575.680.000	1.676.862.241	106,42
Total	21.117.723.197.000	21.124.684.725.208	100,03

Tabel 3
Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Tahun Anggaran 2024
(dalam rupiah)

Jenis Pendapatan	Target	Realisasi	%
Pendapatan dari Pengelolaan BMN	0	36.000.000	0
Pendapatan Bunga, Pengelolaan Biaya Penagihan Pajak Negara dengan Surat Paksa	0	5.150.000	0
Total	0	41.150.000	0

Menurut data dari aplikasi appportal pada tanggal 30 Januari 2025, pendapatan pajak dari Kantor Pelayanan Pajak Madya Surabaya pada tahun Anggaran 2024 untuk sektor perpajakan adalah sebesar Rp21.124.684.725.208 atau 100,03% dari anggaran yang ditetapkan. Akan tetapi menurut aplikasi SAKTI pada tanggal 30 Januari 2025, realisasi Pendapatan Kantor Pelayanan Pajak Madya Surabaya pada Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp18.675.759.233.828 atau 81,22% dari anggaran yang ditetapkan dalam DIPA TA 2024. Akan tetapi, angka pada aplikasi SAKTI tersebut masih dapat berubah hingga laporan keuangan sudah diaudit.

1.2. Belanja Kantor Pelayanan Pajak Madya Surabaya

Belanja Kantor Pelayanan Pajak Madya Surabaya terdiri dari (1) Belanja Pegawai; (2) Belanja Barang; dan (3) Pembayaran Bunga Utang. Komposisi realisasi Belanja Tahun Anggaran 2024 dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 4
Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2024
(dalam rupiah)

No.	Jenis Belanja	Pagu	Realisasi	%
1	Belanja Pegawai	989.914.000	985.802.000	99,58%
2	Belanja Barang	2.698.601.000	2.522.874.157	93,74%
3	Belanja Modal	651.353.000	651.336.600	100%
Jumlah		4.339.868.000	4.160.012.757	96,01%

Tabel 5
Realisasi Belanja dengan Estimasi Belanja TA 2023 dan TA 2024
(dalam rupiah)

No.	Jenis Belanja	TA 2023		TA 2024	
		Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi
1	Belanja Pegawai	995.918.000	971.434.000	989.914.000	985.802.000
2	Belanja Barang	2.398.990.000	2.258.996.452	2.698.601.000	2.522.874.157
3	Belanja Modal	130.090.000	129.374.290	651.353.000	651.336.600
Jumlah		3.603.436.000	3.359.804.742	4.339.868.000	4.160.012.757

Realisasi Belanja Kantor Pelayanan Pajak Madya Surabaya pada Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp4.160.012.757 atau 96,01% dari anggaran yang ditetapkan dalam DIPA. Pagu Belanja KPP Madya Surabaya pada tahun 2024 naik karena salah satunya terdapat harmonisasi anggaran Kanwil DJP Jawa Timur 1 dan KPP Madya Surabaya mendapatkan dana dari harmonisasi tersebut sebesar Rp499.100.000,00.

2. Bagian Anggaran 999

2.1. Pendapatan Kantor Pelayanan Pajak Madya Surabaya

Tidak terdapat pendapatan pada BA 999 satker KPP Madya Surabaya pada Tahun Anggaran 2024.

2.2. Belanja Kantor Pelayanan Pajak Madya Surabaya

Tidak terdapat belanja pada BA 999 satker KPP Madya Surabaya pada Tahun Anggaran 2024.

C. Kinerja Lain-Lain

1. Jenis Penghargaan

No	Nama Penghargaan	Pemberi Penghargaan	Tanggal Penerimaan	Kategori Penghargaan	Keterangan Tambahan
1	Penghargaan Perolehan Predikat Zona Integritas menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)	Kementerian Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi	11 Desember 2024	Unit Kerja Pelayanan berpredikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)	Diterima oleh Kepala KPP Madya Surabaya
2	Penetapan Penghargaan Hasil Kinerja Penagihan di Lingkungan Kementerian Keuangan Jawa Timur Tahun 2024	Perwakilan Kementerian Keuangan Jawa Timur	30 Agustus 2024	Kantor Pelayanan Pajak dengan Capaian Hasil Lelang Serentak Tertinggi ketiga untuk Kantegori Madya	Dikirim melalui naskah dinas elektronik

2. Proses Perolehan Penghargaan

Untuk memperoleh penghargaan yang telah dijelaskan diatas, KPP Madya Surabaya telah menjalani berbagai proses yang melibatkan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi yang terstruktur terhadap program kerja yang dilaksanakan. Setiap penghargaan yang diterima merupakan hasil dari kerja keras dan kolaborasi yang solid. Untuk penghargaan perolehan predikat ZIWBBM, KPP Madya Surabaya telah mempersiapkan diri dari tahun 2023. Semua aspek disiapkan dengan baik. Selain itu, terdapat pula beberapa faktor yang melatarbelakangi keberhasilan tersebut yaitu:

- Inovasi dan kreativitas yang dibangun oleh KPP Madya Surabaya. KPP Madya Surabaya berhasil menciptakan beberapa inovasi antara lain KINAN (Tracking Layanan), MONCER (Monitoring Capaian AR), dan Pemutaran Video KEKP.
- Selama 2024 KPP Madya Surabaya juga berhasil melampaui target yang ditentukan bahkan dari tahun 2023. Pada tahun 2024 ini KPP Madya Surabaya berhasil mendapatkan Nilai Kinerja Organisasi sebesar 108,54%.
- Dedikasi dan integritas dalam menjalankan tugas dan fungsi unit juga selalu dilakukan oleh Pegawai KPP Madya Surabaya. Pegawai KPP Madya Surabaya selalu menjaga integritas dalam pelaksanaan kerja. Hal ini dibuktikan dengan tidak adanya pemungutan uang atas layanan perpajakan yang diberikan oleh KPP Madya Surabaya.

BAB IV

PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah salah satu upaya memberikan gambaran tingkat kegagalan dan keberhasilan setiap program kerja yang dibuat dalam rangka mencapai sasaran dari tujuan suatu instansi pemerintah secara jelas dan transparan.

KPP Madya Surabaya pada tahun 2024 telah berhasil mencapai sasaran tersebut, namun ada kegiatan yang masih belum dapat dicapai sehingga perlu dilakukan evaluasi untuk mempersiapkan strategi pada tahun-tahun berikutnya.

Selanjutnya dengan tersusunnya LAKIN KPP Madya Surabaya Tahun 2024, diharapkan menjadi masukan bagi semua pihak yang terkait dengan laporan ini. Perbaikan sangat diperlukan dan diharapkan untuk lebih mengoptimalkan penerimaan pajak di tahun mendatang.

Surabaya, 31 Januari 2025
Kepala Kantor



Ditandatangani secara elektronik
Teguh Iman Wirotomo

LAMPIRAN-LAMPIRAN

- 1. Nilai Kinerja Organisasi Tahun 2020 - 2024**
- 2. Laporan Realisasi Pendapatan Tahun 2024**
- 3. Laporan Realisasi Belanja Tahun 2024**
- 4. Laporan Barang Milik Negara Intrakomtabel Tahun 2024**
- 5. Penghargaan KPP Madya Surabaya Tahun 2024**
- 6. Penyampaian Masukan Refinement IKU/IKI Tahun 2024**
- 7. Buku Renstra DJP 2020 - 2024**